



2022

LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021. LKj IP BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021, merupakan bentuk usaha nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021 adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat mengenai kinerja instansi pemerintah khususnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar selama 1 (satu) tahun anggaran. Proses kinerja BPKAD Kabupaten Blitar telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada BPKAD Kabupaten Blitar adalah (1) untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta capaian keberhasilan pada saat ini, (2) untuk mempercepat peningkatan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BPKAD Kabupaten Blitar, kita dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021 ini, semoga dapat digunakan secara optimal dan konstruktif oleh para pemangku kepentingan/ *stakeholders* dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah dan senantiasa membawa antusiasme baru dalam peningkatan pelayanan publik/ fasilitasi masyarakat di masa mendatang.

Blitar, Maret 2023

KEPALA BPKAD KAB. BLITAR

KURDIYANTO, SE., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19770422 200212 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Bagan	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Umum	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.3 Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2 Realisasi Anggaran	151
BAB IV PENUTUP	157
4.1 Simpulan	157
4.2 Rencana Tindak Lanjut	159
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.2.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Blitar	4
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Eselonisasi.....	5
Tabel 1.2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Golongan.....	6
Tabel 1.2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia	7
Tabel 1.2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 1.2.5 Data Sarana dan Prasarana pada BPKAD Kabupaten Blitar.....	9
Tabel 1.2.6 Daftar Perlengkapan BPKAD Kabupaten Blitar.....	9
Tabel 1.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis BPKAD Kabupaten Blitar	12
Tabel 1.3.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur	13
Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja	17
Tabel 3.1.1 Realisasi dan Capaian Kinerja.....	32
Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	143
Tabel 3.1.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	149
Tabel 3.2.1 Alokasi per Sasaran Pembangunan	152
Tabel 3.2.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	153
Tabel 3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	155

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Dengan terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam tata pemerintahan pada saat ini, maka upaya untuk mencapai pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi, dimana di era disrupsi (perubahan yang terjadi dengan cepat di setiap aspek kehidupan) yang ditandai dengan perkembangan digitalisasi informasi yang sangat cepat, pemerintahan dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik lebih baik. Optimalisasi pelayanan pemerintahan berbasis digitalisasi teknologi informasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Proses tersebut dapat berjalan semakin masif dengan menerapkan kolaborasi lintas fungsi pemerintah daerah.

Dalam implementasinya, tingkat kecepatan dan ketepatan pelayanan publik pemerintah daerah dipengaruhi oleh kesiapan perangkat daerah dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan kepala daerah berbasis tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perangkat daerah menjabarkan visi misi kepala daerah (RPJMD) ke dalam dokumen perencanaan Rencana Strategik (Renstra), dimana didalamnya terdapat indikator dan target tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah. Penyusunan indikator dan target tersebut dilaksanakan dengan metode SMART, yaitu *Specific* (sasaran kinerja harus bersifat spesifik), *Measurable* (sasaran kinerja yang disusun dapat diukur), *Achievable* (target yang ditetapkan dapat dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia), *Relevant* (sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab perangkat daerah), dan *Time-bound* (sasaran kinerja yang disusun memiliki target waktu yang jelas).

Selanjutnya Renstra perangkat daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja). Perangkat daerah melaksanakan penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja setiap tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam evaluasi SAKIP yakni pra-evaluasi, evaluasi mendalam, dan penyampaian hasil.

Fokus evaluasi SAKIP perangkat daerah secara garis besar terdapat 3 (tiga) kriteria. Pertama, tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor-sektor prioritas pembangunan daerah. Kedua, perjenjangan kinerja instansi pemerintah. Ketiga, pelaksanaan evaluasi internal memberikan dampak bagi perbaikan implementasi SAKIP pada perangkat daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan. BPKAD Kabupaten Blitar telah melaksanakan proses perencanaan kinerja perangkat daerah dengan menyusun Renstra Tahun 2021-2026 dan menyusun Renja Tahun 2022. Melalui tema RKPD Tahun 2022: Pembangunan SDM dan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan, dan melalui agenda prioritas pembangunan tahun 2024: pemantapan tata kelola pemerintahan, penguatan BUMD, dan peningkatan pendapatan daerah, BPKAD Kabupaten Blitar menetapkan prioritas program dan kegiatannya pada pemantapan tata kelola pemerintahan di bidang keuangan daerah. Hal tersebut sebagai upaya BPKAD Kabupaten Blitar mewujudkan capaian visi misi kepala daerah dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, maka BPKAD Kabupaten Blitar menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas capaian sasaran strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 bertujuan untuk: (1) Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, (2) Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur, (3) Meningkatkan kerja sama/ kolaborasi antar bidang/ lintas fungsi, dan (4) Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di masa mendatang pascaevaluasi pelaksanaan SAKIP.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan, maka kelembagaan BPKAD Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut, BPKAD Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah dengan klasifikasi kelembagaan Tipe A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka BPKAD Kabupaten Blitar mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKAD Kabupaten Blitar.

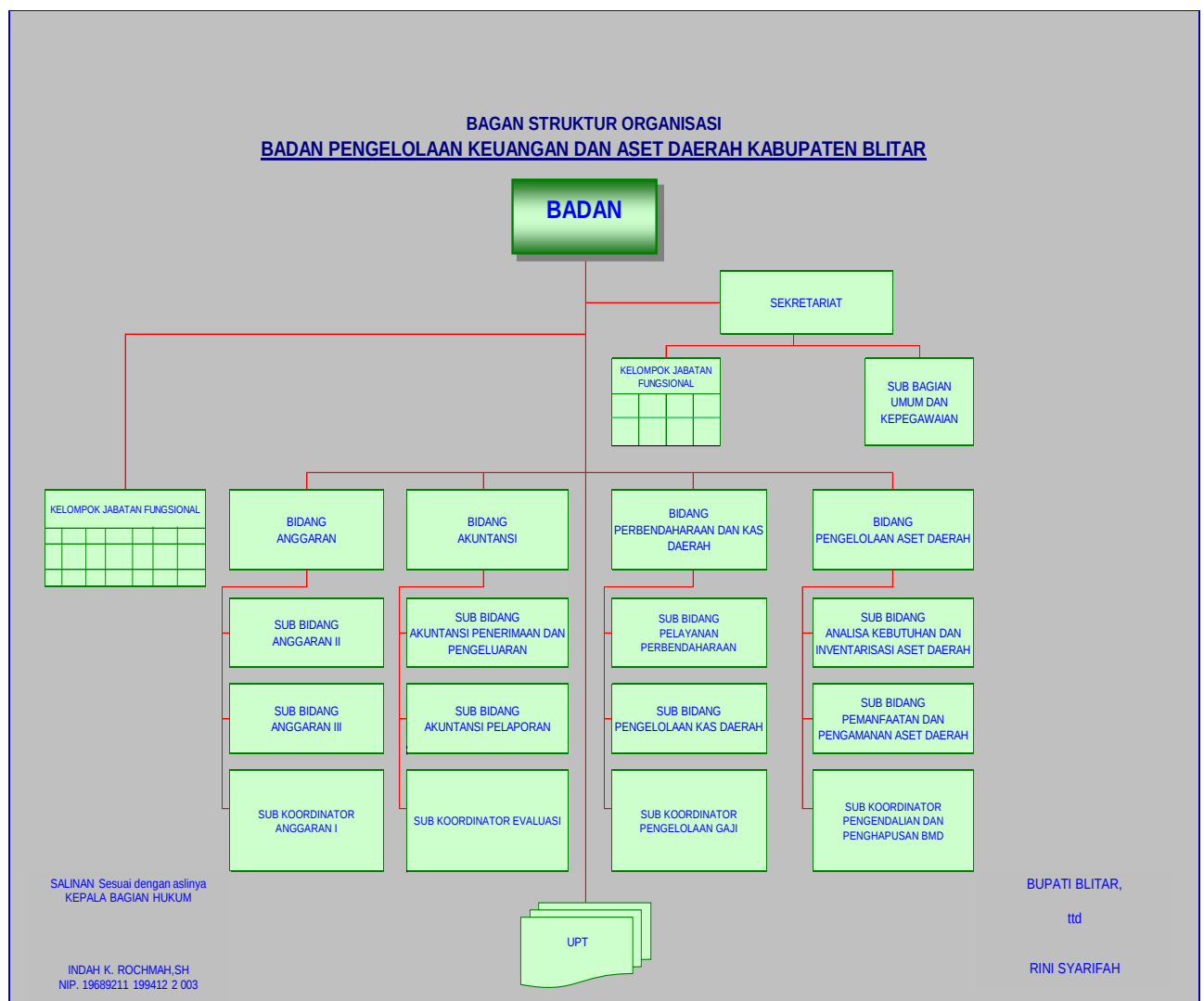
Dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2021, maka susunan organisasi BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Koordinasi Perencanaan Program (JF Perencana Ahli Muda);
 - b. Sub Koordinasi Keuangan (JF: Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda);
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Sub Koordinasi Anggaran I (JF: Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda);
 - b. Sub Bidang Anggaran II;
 - c. Sub Bidang Anggaran III.
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - c. Sub Koordinasi Pengelolaan Gaji (JF: Analis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda).

5. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
 - c. Sub Koordinasi Evaluasi (JF: Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda).
6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi;
 - b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
 - c. Sub Koordinasi Pengendalian, Penghapusan BMD (JF: Analis Kebijakan Ahli Muda).
7. Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB)
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)

Bagan 1.2.1

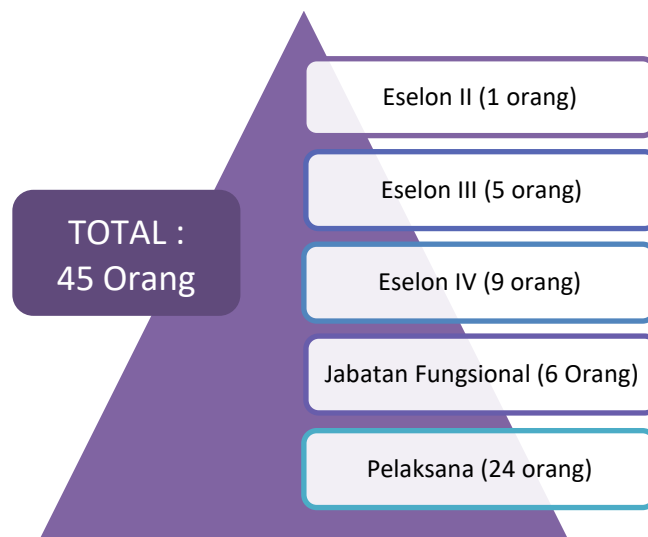
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Blitar



Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BPKAD Kabupaten Blitar dititikberatkan untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021-2026, khususnya misi ke-3 yaitu **"Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas"**. Saat ini, BPKAD Kabupaten Blitar didukung oleh 45 Orang PNS. Dengan didasari atas keberagaman komposisi kepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (gender), golongan maupun tingkat pendidikan. Penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi BPKAD Kab. Blitar secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

Dilihat dari tingkat eselonnya, di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar terdapat 1 orang eselon II , Eselon III sebanyak 5 orang. Sedangkan jumlah Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana secara berturut-turut sebesar 9 orang, 6 orang dan 24 orang.



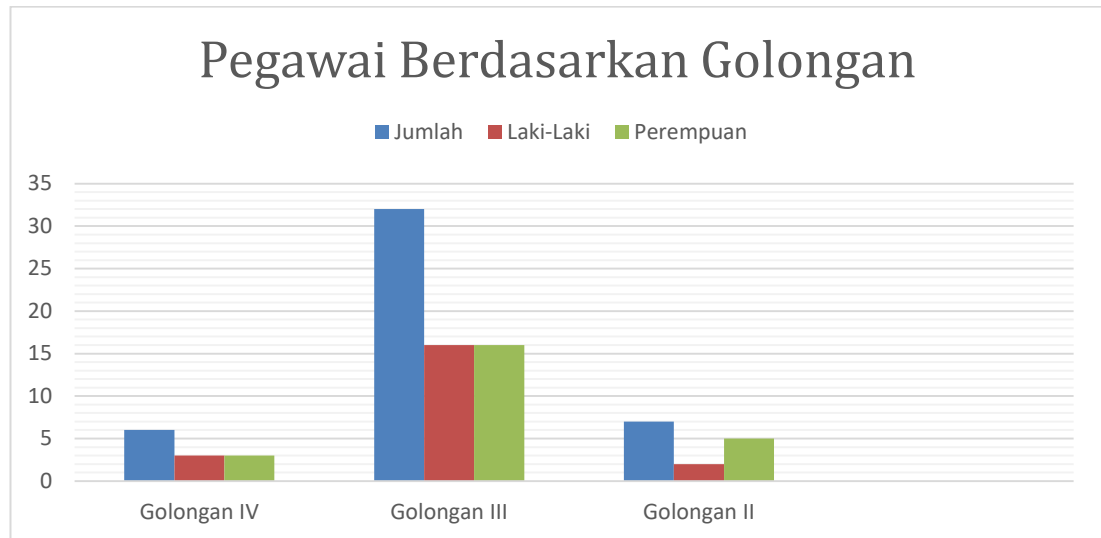
Tabel 1.2.1
 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Eselonisasi

No	Kelompok Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II b	1	-	1
2.	Eselon III a	-	1	1
3.	Eselon III b	3	1	4
4.	Eselon IV a	6	3	9
5.	Jabatan Fungsional	4	2	6
6.	Jabatan Pelaksana	7	17	24
TOTAL		21	24	45

Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Dilihat dari tingkat golongannya, sebagian besar pegawai BPKAD Kabupaten Blitar berada di golongan III, yaitu sebanyak 32 orang. Sedangkan jumlah pegawai dengan golongan II dan IV secara berturut-turut sebesar 7 orang dan 6 orang.



Tabel 1.2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Golongan

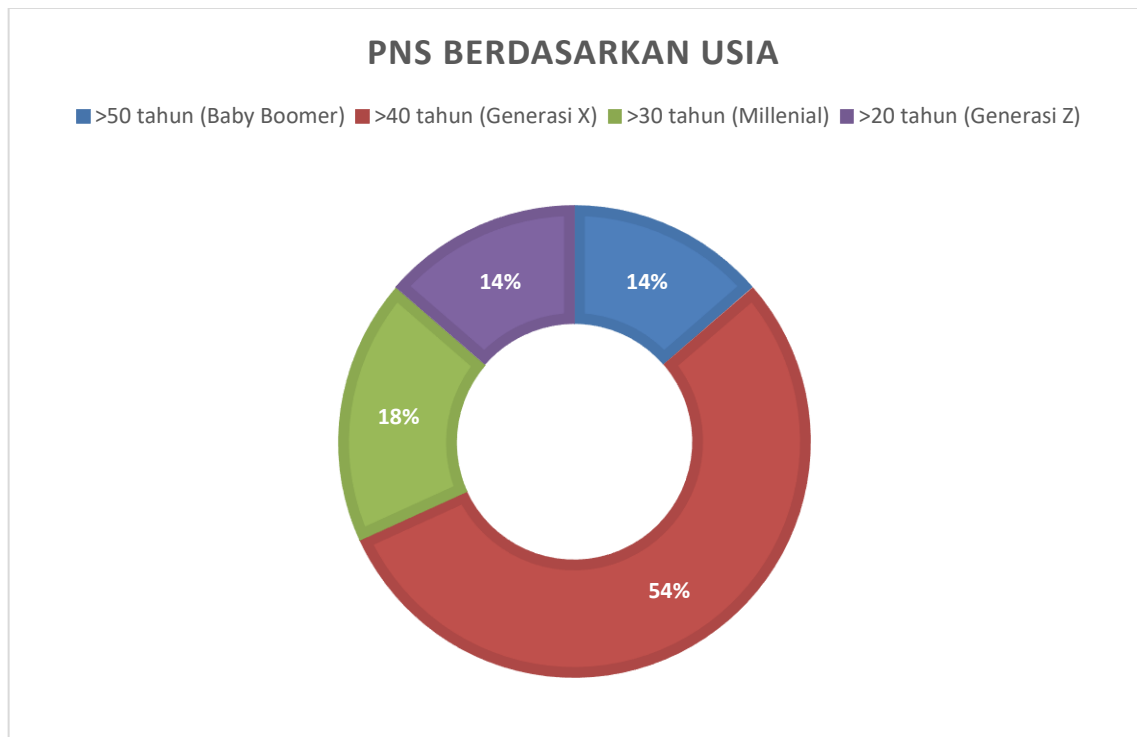
No	Kelompok Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	3	3	6
2.	Golongan III	16	16	32
3.	Golongan II	2	5	7
4.	Golongan I	-	-	-
TOTAL		21	24	45

Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Dilihat dari struktur komposisi usia, pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar masih tergolong dalam usia produktif, dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh kelompok Generasi X (usia lebih dari 40 tahun kurang dari 50 tahun) yaitu sebanyak 24 pegawai (54%). Pegawai dari kelompok Generasi Millenial (lebih dari 30 tahun kurang dari 40 tahun) berjumlah 8 pegawai (22%), Kelompok Baby Boomers berjumlah 7 pegawai (14%) dan Kelompok Generasi Z berjumlah 6 pegawai (14%)

Dengan postur SDM yang demikian, diharapkan manajemen pengelolaan SDM di BPKAD Kabupaten Blitar mampu menciptakan sumber daya yang inovatif untuk mendukung kemajuan organisasi.



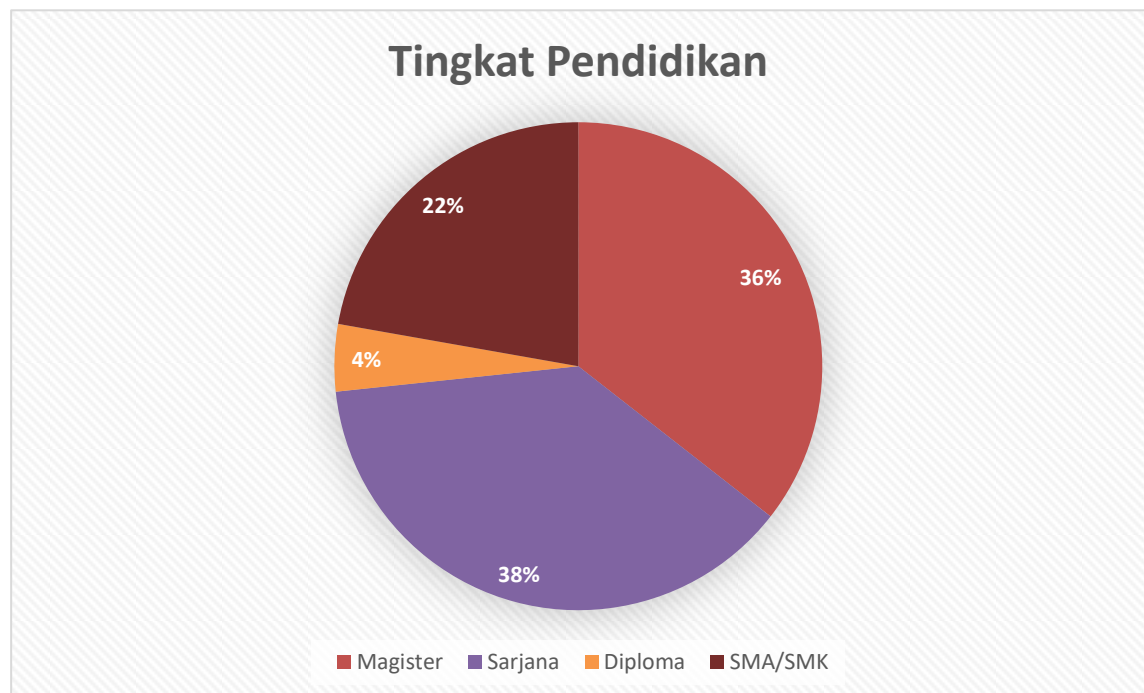
Tabel 1.2.3
 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	> 50 tahun (BB)	1	6	7
2.	> 40 tahun (X)	14	10	24
3.	> 30 tahun (Mill)	3	5	8
4.	> 20 tahun (Z)	3	3	6
TOTAL		21	24	45

Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari struktur tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai BPKAD Kabupaten Blitar telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data kepegawaian per November 2022, sebanyak 16 pegawai (36%) dari total jumlah pegawai BPKAD Kabupaten Blitar (45 orang) telah memperoleh pendidikan S2; sebanyak 17 pegawai (38%) telah memperoleh pendidikan S1; sebanyak 2 pegawai (4%) berpendidikan DIII, sementara yang lainnya sebanyak 10 pegawai (22%) memiliki pendidikan SMA/ DI ke bawah.



Tabel 1.2.4
 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-2	10	6	16
2.	S-1	9	8	17
3.	Diploma	-	2	2
4.	SMA/ SMK	2	8	10
TOTAL		21	24	45

Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada BPKAD Kabupaten Blitar, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan PNS sebanyak 63 orang, yang terdiri dari 15 pejabat struktural 7 Pejabat Fungsional dan 41 pelaksana.

Sarana Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada BPKAD Kabupaten Blitar didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. Aset pada BPKAD Kabupaten Blitar terbagi dalam bidang barang, yaitu (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi, Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, (6) Aset Tak Berwujud.

Barang Milik Daerah (BMD) tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada BPKAD Kabupaten Blitar, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi. Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada BPKAD Kabupaten Blitar sebagaimana pada **Tabel 1.2.5** dan **Tabel 1.2.6**

Tabel 1.2.5

Data Sarana dan Prasarana pada BPKAD Kabupaten Blitar
(Kondisi per Desember 2022)

NO	JENIS ASET	NILAI	KET.
1	Tanah	80.197.411.020,00	
2	Peralatan dan Mesin	7.113.609.060,00	
3	Gedung dan Bangunan	23.175.369.930,00	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	197.912.800.000,00	
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	
6	Aset Tak Berwujud	0,00	
Jumlah		308.399.190.010,00	

Sumber Data : Data BMD BPKAD

Tabel 1.2.6

Daftar Perlengkapan BPKAD Kabupaten Blitar

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1.	Sepeda Motor Roda Dua	26 Unit	
2.	Mesin Foto Copy	1 Unit	
3.	AC Split	15 Unit	
4.	Kipas angin	4 Unit	
5.	PC Unit	38 Unit	
6.	Laptop	22 Unit	
7.	Tablet	4 Unit	
8.	Printer	55 Unit	
9.	Scaner	4 Unit	
10.	Server	1 Unit	
11.	Meja Kerja	38 Unit	

12.	Meja Rapat	1 Set	
13.	Kursi Kerja	60 Unit	
14.	Kursi Rapat	37 Unit	
15.	Kursi Tamu	3 Set	
16.	Proyektor	8 Unit	
17.	Layar Slide	2 Unit	
18.	Telepon	4 Unit	
19.	Faximile	1 Unit	
21.	Monitor	23 Unit	
22.	Hub	2 Unit	
23.	Jaringan	2 Set	
24.	Tustel	2 Unit	
25.	Mesin Hitung	22 Unit	
26.	Mesin Ketik Manual	1 Unit	
27.	GPS	2 Unit	
28.	Mobil Roda 4	1 Unit	
29.	Mesin Foto Copy	1 Unit	
30.	Lemari	6 Unit	
31.	Rak Besi	2 Unit	
32.	Filling Cabinet	15 Unit	
33.	Brangkas	2 Unit	
34.	Lemari Kaca	11 Unit	
35.	Alat Penghancur Kertas	3 Unit	
36.	Lemari Es	2 Unit	
37.	Jam Elektronik	7 Unit	
38.	Waterpump	3 Unit	
39.	Mesin Potong rumput	4 Unit	
40.	Televisi	3 Unit	
41.	Sound system	7 Unit	
42.	Wireless	1 set	
43.	Camera video	32 Unit	
44.	Dispenser	2 Unit	
45.	Pemadam	3 Unit	

46.	Alat Kantor Lainnya	45 Unit	
47.	UPS	4 Unit	
48.	Mesin Absensi	2 Unit	
49.	Whiteboard	5 Unit	
50.	Sice	1 Unit	

Sumber Data : Data BMD BPKAD Kab. Blitar

1.3 Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi OPD maka terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diperhatikan dan dimitigasi risikonya dalam perencanaan kinerjanya. Hal tersebut sebagai bentuk penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi perangkat daerah. Dengan harapan fungsi pelayanan publik perangkat daerah dapat berjalan optimal dan mendukung percepatan capaian kinerja organisasi. Maka penyusunan Perubahan Rencana Strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis internal maupun eksternal. Isu-isu strategis BPKAD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Terhadap Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi, melalui Optimalisasi Implementasi Penyederhanaan Birokrasi, Penguatan Budaya Kerja Organisasi, Penguatan Kinerja Organisasi, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembangunan Zona Integritas;
2. Tantangan Penyediaan Layanan Publik Yang Lebih Cepat, Baik dan Murah Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, berbasis Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Tantangan penguatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dari potensi-potensi baru, dan penekanan beban alokasi belanja pegawai daerah yang sesuai dengan ketentuan;
4. Tantangan penganggaran yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung program-program prioritas pembangunan daerah;
5. Tantangan peningkatan pelayanan perbendaharaan dan kas daerah yang efektif dalam rangka mendukung realisasi penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan;
6. Tantangan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, melalui peningkatan kapasitas Pejabat Penatausahaan BMD pada PD dan percepatan penyelesaian masalah aset daerah;

7. Tantangan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih efektif, melalui peningkatan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada PD;
8. Pengalokasian/ penambahan SDM yang sesuai dengan Standar Kebutuhan Pegawai/ Analisa Beban Kerja pada BPKAD Kabupaten Blitar; dan
9. Optimalisasi pengelolaan data dan arsip pengelolaan keuangan dan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar

Di lingkup eksternal, berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka dapat ditelaah permasalahan dan isu-isu strategis sebagai berikut:

Tabel 1.3.1
 Permasalahan dan Isu Strategis
 BPKAD Kabupaten Blitar

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
M.3	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas	Implementasi SAKIP, RB, Inovasi dan pembangunan ZI yang belum optimal	Kebijakan (<i>political will</i>) Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Panca Bhakti;	Belum optimalnya pemahaman SDM Aparatur terkait implementasi SAKIP RB dan ZI
T.1	Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas	2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang belum dapat diimplementasikan secara optimal	Akses komunikasi (koordinasi dan konsultasi) yang mudah dengan PD pengampu dan terdapat juknis pelaksanaan SIPD	Belum optimalnya pemahaman SDM Aparatur terkait implementasi SIPD
S.2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemda	Penyusunan LKPD dan Laporan BMD yang kurang optimal	Dilaksanakannya Rekonsiliasi Keuangan PD	Belum optimalnya peran PPK PD dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

			Dilaksanakannya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah PD	Belum optimalnya Penyelesaian permasalahan pengelolaan aset daerah dan peran Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, Pejabat Panatausahaan BMD pada PD dalam pengelolaan BMD;
--	--	--	---	--

Di lingkup Provinsi Jawa Timur, maka dapat ditelaah permasalahan dan isu-isu strategis sebagai berikut:

Tabel 1.3.2
 Permasalahan dan Isu Strategis
 BPKAD Provinsi Jawa Timur

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Implementasi SAKIP, RB, Inovasi dan pembangunan ZI yang belum optimal	Kebijakan (<i>political will</i>) Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Panca Bhakti;	Belum optimalnya pemahaman SDM Aparatur terkait implementasi SAKIP RB dan ZI
2.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang belum dapat diimplementasikan secara optimal	Akses komunikasi (koordinasi dan konsultasi) yang mudah dengan PD pengampu dan terdapat petunjuk teknis pelaksanaan SIPD	Belum optimalnya pemahaman SDM Aparatur terkait implementasi SIPD

3.	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang handal dan terintegrasi berbasis TI serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kab/kota yang akuntabel dan taat asas.	Penyelenggaraan SIPD yang belum optimal, karena kendala teknis dari pusat	Akses komunikasi (koordinasi dan konsultasi) yang mudah dengan perangkat daerah pengampu dan terdapat petunjuk teknis pelaksanaan SIPD	Belum optimalnya pemahaman SDM Aparatur terkait implementasi SIPD
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penyelenggaraan SIPD yang belum optimal dan belum terintegrasinya aplikasi keuangan daerah dan aplikasi BMD	Dilaksanakannya Rekonsiliasi Keuangan dan Barang Milik Daerah PD	Belum optimalnya peran PPK PD dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan belum optimalnya peran Pejabat Penatausahaan Keuangan PD;

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka BPKAD Kabupaten Blitar dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Blitar.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang, maka berikut ini rumusan isu strategis pembangunan Blitar 2021-2026 :

1. Pengelolaan keuangan daerah (penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan) akan menyesuaikan SIPD yang dapat diintegrasikan dengan Aplikasi Pengelolaan BMD, dimana sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, RKA, RKA-P, DPA, DPPA, Penyusunan APBD, Perubahan APBD, pencairan, dan pelaporan;
2. Tuntutan Terhadap Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi, melalui Optimalisasi Implementasi Penyederhanaan Birokrasi, Penguatan Budaya Kerja Organisasi, Penguatan Kinerja Organisasi, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembangunan Zona Integritas;

3. Tantangan Penyediaan Layanan Publik Yang Lebih Cepat, Baik dan Murah Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, berbasis Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Tantangan penguatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dari potensi-potensi baru, dan penekanan beban alokasi belanja pegawai daerah yang sesuai dengan ketentuan;
5. Tantangan penganggaran yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung program-program prioritas pembangunan daerah;
6. Tantangan peningkatan pelayanan perbendaharaan dan kas daerah yang efektif dalam rangka mendukung realisasi penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan;
7. Tantangan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, melalui peningkatan kapasitas Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, Pejabat Panatausahaan BMD dan percepatan penyelesaian masalah aset daerah;
8. Tantangan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih efektif, melalui peningkatan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada PD
9. Pengalokasian/ penambahan SDM yang sesuai dengan Standar Kebutuhan Pegawai/ Analisa Beban Kerja pada BPKAD Kabupaten Blitar
10. Optimalisasi pengelolaan data dan arsip pengelolaan keuangan dan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2022 merupakan komitmen antara pemberi amanah (pimpinan instansi yang lebih tinggi) kepada penerima amanah (pimpinan instansi) atas kesepakatan penetapan kinerja yang terukur dan terarah. Penetapan kinerja tersebut menjadi bagian dari perencanaan kinerja, yang menjadi pedoman bagi penerima amanah, untuk mencapai sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan, berdasarkan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran, indikator, dan target di dalam dokumen Perjanjian Kinerja diambil dari Rencana Kerja Tahunan (Renja Perangkat Daerah) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Di dalam dokumen Renstra dijelaskan bahwa BPKAD Kabupaten Blitar mendukung Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang ke-3: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Daerah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas. Hal tersebut didukung dengan penetapan sasaran strategis BPKAD Kabupaten Blitar, yaitu (1) meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai SAKIP); (2) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah/ IPKD); (3) meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah; (4) Terselenggaranya Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara Efektif dan Efisien; (5) Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel; dan (6) Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Bernilai Baik dan Wajar.

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Secara kinerja kelembagaan, di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sasaran Strategis Perangkat Daerah menjadi kewenangan Kepala Daerah. Pajabat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah) bertanggungjawab pada level Program. Selanjutnya Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) bertanggungjawab pada level Kegiatan, dan Pejabat Eselon IV bertanggungjawab pada level Sub Kegiatan. Pelaksana bertanggungjawab atas uraian tugasnya, yaitu membantu atasan langsung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
 Perjanjian Kinerja
 BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	78/ BB
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10
	Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	15
	Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	8
	Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD	12
	Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	5
	Opini BPK	15
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	85%
Terselenggaranya Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara Efektif dan Efisien	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100%
	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	91%
	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	82%
	Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100%
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Bernilai Baik dan Wajar	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	90%

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	19.066.332.609,00	APBD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	388.792.969.872,00	APBD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.147.323.300,00	APBD
JUMLAH	412.006.625.781,00	

Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 secara garis besar merupakan upaya untuk menjawab permasalahan daerah di bidang peningkatan kinerja perangkat daerah menuju optimalisasi pelayanan masyarakat, dan secara khusus peningkatan pengelolaan keuangan daerah menuju kemandirian fiskal daerah. Permasalahan tersebut direspon BPKAD Kabupaten Blitar melalui penetapan sasaran strategis sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

INDIKATOR : Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah
TARGET : 78/ BB

Sasaran Strategis 1 merupakan upaya untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Blitar sebagai pengampu urusan pemerintahan penunjang di bidang keuangan. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur melalui komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sasaran Strategis 1 mangacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Sasaran Strategis 1 didukung oleh Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rata-rata Tk. Cap. Kinerja Seluruh Keg. pada Program Penunjang Urusan Pemda	100
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, & Ev. Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan	100
Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan PD	2

Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Persentase Lap. Admin. Keu PD yang Tepat Waktu dan Akuntabel	100
Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47
Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	480
Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keu Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keu Akhir Tahun SKPD	1
Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Admin Kepegawaian PD	100
Sub. Keg. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Per UU	55
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Adm Umum yg Akuntabel	12
Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14
Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7
Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3
Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16
Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap.Peny. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda yang Tepat Sasaran	100
Sub. Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan yang Disediakan	17
Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27
Sub. Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemda yg Disediakan Tepat Waktu	100

Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemda dalam Kondisi Baik	100
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23
Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69
Sub. Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	3

SASARAN STRATEGIS 2	: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
INDIKATOR	: 1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; 2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; 3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD; 5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan 6. Opini BPK.
TARGET	: 1. 10 2. 15 3. 8 4. 12 5. 5 6. 15

Sasaran Strategis 2 mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel pada periode tertentu, meliputi perencanaan, penganggaran, transparansi, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

1. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - a. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD
 - b. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA PPAS
 - c. Kesesuaian Nomenklatur Program KUA PPAS dan APBD
 - d. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA PPAS
 - e. Kesesuaian Pagu Program KUA PPAS dan APBD
2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD;
 - a. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Fungsi Pendidikan sebesar 20%
 - b. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Urusan Kesehatan sebesar 10%
 - c. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Infrastruktur sebesar 25%

- d. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - a. Ketepatan Waktu
Merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan daerah oleh pemerintah daerah melalui Sistem informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Keteraksesan
Merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk public melalui system informasi pemerintahan daerah, sekurang-kurangnya 2 tahun anggaran.
4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD;
 - a. Penyerapan Anggaran Belanja Operasional
 - b. Penyerapan Anggaran Belanja Modal
 - c. Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga
 - d. Penyerapan Anggaran Belanja Transfer
5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah;
 - a. Kemandirian Keuangan
 - b. Fleksibilitas Keuangan
 - c. Solvabilitas Keuangan
 - d. Solvabilitas Jangka Pendek
 - e. Solvabilitas Jangka Panjang
 - f. Solvabilitas Layanan
6. Opini BPK
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan pengukuran berdasarkan Opini BPK atas LKPD yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir berturut-turut.

Penentuan bobot dimensi IPKD adalah sebagai berikut:

DIMENSI	BOBOT
Indeks Dimensi Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD	15
Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	15
Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD	20
Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	15
Opini BPK.	15
TOTAL	100

Sasaran Strategis 2 didukung oleh Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	100%	
	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	91%	
	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	82%	
	Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100%	
	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	Mendukung Dimensi 1, Dimensi 2, Dimensi 3, Dimensi 6
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	2	
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	

Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52	
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	52	
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2	
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dok Regulasi serta Kebijakan Bid. Anggaran	1	
Keg Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tk Penyerapan Anggaran PD sesuai Rencana	95%	Mendukung Dimensi 3, Dimensi 4, dan Dimensi 6
Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15.052	
Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.200	
Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi Sinkronisasi Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	

Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dan Laporan Arus Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Lap Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7	
Sub.Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dok Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	
Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu yg Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	1	
Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pemerintah Kabupaten/ Kota	100	
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan	100%	Mendukung Dimensi 3, Dimensi 5, dan Dimensi 6

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR

Sub.Keg. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12
Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dok Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	77
Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	26
Sub.Keg. Koordinasi dan Penysusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota	Jumlah Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7
Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan/ TL Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dok Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1
Sub.Keg. Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jml Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1
Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Paduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Kebj dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	2

Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/ Kota	106	
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana BK, Bagi Hasil, dan Dana Darurat	100%	Dimensi 3, Dimensi 4, dan Dimensi 6
Sub.Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jml Lap Hasil Analisis Perencanaan & Penyaluran BK	1	
Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	
Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	1	

Tujuan pengukuran IPKD adalah (1) mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada periode tertentu; (2) memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; (3) melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD pemerintah daerah; (4) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah; dan (5) meningkatkan pengawasan internal atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

INDIKATOR : Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah

TARGET : 85

Sasaran Strategis 3 mengukur kualitas pengelolaan aset/ BMD, sebagai satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan daerah, dimana di dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Nilai BMD masuk ke dalam pencatatan Aset Tetap. Tingkat kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset dapat tercapai jika proses pengelolaan BMD (perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan) dapat berjalan sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD;
3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD

Sasaran Strategis 3 didukung oleh Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	90%
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai Peraturan UU	90%
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Penatausahaan BMD	1
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Hasil Pengamanan BMD	3
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD	2
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jml Dok Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD	4

Dengan meningkatnya pengelolaan aset daerah, maka dapat mendukung pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset daerah secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah.

SASARAN STRATEGIS 4	: Terselenggaranya Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara Efektif dan Efisien
INDIKATOR	: Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
TARGET	: 75%

Sasaran Strategis 4 mengukur kualitas penunjang urusan pemerintah daerah meliputi Kegiatan: (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, (2) Administrasi Keuangan, (3) Administrasi Kepegawaian, (4) Pengadaan BMD, (5) Penyediaan Jasa Penunjang, (6) Pemeliharaan BMD, (7) Administrasi Umum. Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui penjumlahan capaian kinerja 7 kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemda dibagi 7, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Rata-Rata Tk. Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Cap.Keg 1} + \text{Cap.Keg 2} + \text{Cap.Keg 3} + \text{Cap.Keg 4} + \text{Cap.Keg 5} + \text{Cap.Keg 6} + \text{Cap.Keg 7}}{7}$$

SASARAN STRATEGIS 5	: Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel
INDIKATOR	: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP
TARGET	: 100% 91% 82% 100%

Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran diukur dengan perhitungan kesesuaian program yang ditetapkan dalam dokumen RKPD dengan program yang ditetapkan dalam dokumen DPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Program yang Sesuai dalam DPA}}{\text{Total Program RKPD}} \times 100\%$$

Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja diukur dengan perhitungan Realisasi Belanja dibandingkan dengan Anggaran Belanja, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan diukur dengan perhitungan Realisasi Pendapatan dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP diukur dengan perhitungan Realisasi SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP dibandingkan dengan Jumlah SKPD, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{SKPD yang menyusun LK tepat waktu dan sesuai SAP}}{\text{Total SKPD}} \times 100\%$$

SASARAN STRATEGIS 6	: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
INDIKATOR	: Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar
TARGET	: 90%

Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah diukur dengan perhitungan Nilai BMD dalam Aplikasi SIMBADA dibandingkan dengan Nilai Aset Tetap dalam Neraca Keuangan, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai BMD}}{\text{Nilai Aset Tetap (dalam Neraca Laporan Keuangan)}} \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 mendiskripsikan pengukuran capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, dimana Eselon II mengampu sasaran program, eselon III mengampu sasaran kegiatan, eselon IV mengampu sasaran sub kegiatan, dan pelaksana membantu melaksanakan tugas atasan langsungnya, melalui penjabaran uraian kerja.

Tabel 3.1.1
 Realisasi dan Capaian Kinerja
 BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah</i>	78/ BB	85,45/ A	109,55%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</i>	10,0000	14,4800	144,80%
	<i>Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD</i>	15,0000	20,0000	133,33%
	<i>Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	8,0000	15,0000	187,50%
	<i>Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD</i>	12,0000	11,0000	91,66%
	<i>Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah</i>	5,0000	1,7550	35,10%
	<i>Opini BPK</i>	15,0000	15,0000	100,00%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	<i>Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah</i>	85%	96,96%	114,07%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terselenggaranya Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara Efektif dan Efisien	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	100%	133,33%
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	100%
	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	91%	91,31%	100,34%
	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	82%	102,22%	124,65%
	Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Bernilai Baik dan Wajar	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	90%	100%	111,11%

Selanjutnya capaian kinerja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 dijabarkan dalam perhitungan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
INDIKATOR	: Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah
TARGET	: 78/BB
REALISASI	: 85,45/A
CAPAIAN	: 109,55%

Dalam rangka meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan dukungan peningkatan kinerja pada masing-masing bidang, melalui tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi mandiri terkait implementasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB Nomor 88

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil sebagai berikut:

KOMPONEN	BOBOT	NILAI 2021	NILAI 2022	+ / (-)
SAKIP				
Perencanaan Kinerja	30,00	30,00	30,00	0,00
Pengukuran Kinerja	30,00	23,33	23,40	0,07
Pelaporan Kinerja	15,00	11,29	11,55	0,26
Evaluasi	25,00	20,00	20,50	0,50
Akuntabilitas Kinerja Internal				
TOTAL NILAI	100	84,62	85,45	0,17

Penilaian tersebut didasarkan pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022, sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
	TOTAL NILAI SAKIP			85,45		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		30		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AA	6		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.					
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.					
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.					
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.					
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.					
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.					
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	AA	9		

Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.					
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.					
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.					
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.					
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.					
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).					
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.					
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).					
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).					
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.					
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.					
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	AA	15		
Kriteria:						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.					
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.					
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .					
3	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.					
4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.					
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.					
6	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.					
7	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.					
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		23,4		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	B	4,2		

1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.					
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.					
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.					
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,2		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.					
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.					
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.					
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.					
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.					
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.					
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.					
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.					
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.					
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.					
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.					
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.					
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.					
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					

3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,55		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,7		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.					
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.					
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.					
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.					
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.					
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.					
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	BB	3,6		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.					
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.					
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.					
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.					
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.					
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).					
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.					
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.					
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).					
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25		

1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).					
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.					
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.					
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.					
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.					
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.					
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.					
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,5		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,5		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.					
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.					
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.					
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.					
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.					
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10		

1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.		
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.		
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		

Selanjutnya, dengan nilai SAKIP tersebut, maka dapat dikategorikan predikat sebagai berikut:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan , telah terwujud <i>Good Governance</i> seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80 - 90	Memuaskan , terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/ Pengawas/ Sub Koordinator
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik , terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon III/ Koordinator
4	B	>60 - 70	Baik , terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II/ unit kerja.
5	C	>50 - 60	Cukup (Memadai) , terdapat gambaran bahwa AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

6	CC	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar dilevel pusat.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan Tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Berdasarkan nilai dan tabulasi tersebut, maka nilai SAKIP BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebesar 85,45 dengan Predikat A (Memuaskan), sehingga capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 sebesar 109,55 %, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja IKU 1} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (85,45 / 78) \times 100\% \\
 &= \mathbf{109,55 \%}
 \end{aligned}$$

Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2021, realisasi dan capaian tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, dari target 77 terealisasi 84,62 dengan capaian 109,89%. Dengan perolehan nilai SAKIP Tahun 2022, maka terjadi kenaikan sebesar 0,17 menjadi 85,45. Capaian tersebut didukung oleh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rata-rata Tk. Cap. Kinerja Seluruh Keg. pada Program Penunjang Urusan Pemda	75%	100%	133,33%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, & Ev. Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan	100	100	100%
Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	2	2	100%

Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Persentase Lap. Admin. Keu PD yang Tepat Waktu dan Akuntabel	100	100	100%
Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	47	100%
Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	480	480	100%
Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keu Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keu Akhir Tahun SKPD	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Admin Kepegawaian PD	100	100	100%
Sub. Keg. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Per UU	55	55	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Adm Umum yg Akuntabel	12	12	100%
Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14	14	100%
Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	7	100%
Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	100%
Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16	16	100%
Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap.Peny. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	55	100%

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda yang Tepat Sasaran	100	100	100%
Sub. Keg. Pengadaan Kend. Dinas Operasional atau Lap	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan yang Disediakan	17	17	100%
Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	27	100%
Sub. Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemda yg Disediakan Tepat Waktu	100	100	100%
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100%
Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemda dalam Kondisi Baik	100	100	100%
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kend. Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	23	100%

Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	69	100%
Sub. Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	100%

Analisa Capaian Kinerja:

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah:

1. Tingkat konsistensi yang tinggi dan komitmen pimpinan perangkat daerah, Tim Evaluator SAKIP perangkat daerah, dan *effort/* kesadaran karyawan-karyawati untuk meningkatkan kinerja kelembagaan melalui implementasi SAKIP;
2. Terbentuknya Tim SAKIP perangkat daerah, dengan agenda kerja yang terarah dan terukur dalam penerapan SAKIP di perangkat daerah;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan Renstra Tahun 2021-2026, Renja Tahun 2022, Rencana Aksi Tahun 2022 yang ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten;
4. Terlaksananya monitoring kinerja, pengukuran kinerja melalui Rapat Evaluasi Internal dan Rembug Kinerja melalui desk kinerja di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar;
5. Terlaksananya *upgrading* pemahaman tupoksi (*knowledge*), pembinaan kerja sama tim (*teamwork*), komunikasi efektif (*effective communication*) melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah;

Permasalahan yang dihadapi adalah implementasi penyederhanaan birokrasi yang bermuara pada *impassing* beberapa jabatan struktural ke jabatan fungsional, yang belum efektif.

Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke perangkat daerah terkait, guna mendapatkan kejelasan implementasi pengembangan jabatan fungsional. Kemudian merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM jabatan fungsional (khususnya jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah) pada tahun mendatang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyusun rencana kerja berikut penetapan angka kredit, serta hasil kinerja (ouput) yang dihasilkan, guna mendukung capaian outcome, maupun sasaran strategis perangkat daerah.

SASARAN STRATEGIS 2	: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
INDIKATOR	: 1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; 2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; 3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD; 5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan 6. Opini BPK.
TARGET	: 1. 10,0000 2. 15,0000 3. 8,0000 4. 12,0000 5. 5,0000 6. 15,0000
REALISASI	: 1. 14,4800 2. 20,0000 3. 15,0000 4. 11,0000 5. 1,7550 6. 15,0000
CAPAIAN	: 1. 144,80% 2. 133,33% 3. 187,50% 4. 91,66% 5. 35,10% 6. 100,00%

1. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

a. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD

NO.	RPJMD	RKPD	SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
	URUSAN/ PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM		
1	2	3	4	5
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Pendidikan	Pendidikan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Sesuai	1
3	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Sesuai	1
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Sesuai	1
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Sesuai	1
	Kesehatan	Kesehatan		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sesuai	1
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sesuai	1
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Sesuai	1
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sesuai	1
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Sesuai	1
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sesuai	1

14	<i>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>	<i>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>	Sesuai	1
15	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>	Sesuai	1
16	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	Sesuai	1
17	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	Sesuai	1
18	<i>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</i>	<i>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</i>	Sesuai	1
19	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>	Sesuai	1
20	<i>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</i>	<i>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</i>	Sesuai	1
21	<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	Sesuai	1
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
22	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
23	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	Sesuai	1
24	<i>Program Kawasan Permukiman</i>	<i>Program Kawasan Permukiman</i>	Sesuai	1
25	<i>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</i>	<i>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</i>	Sesuai	1
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
26	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
27	<i>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</i>	<i>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</i>	Sesuai	1
28	<i>Program Penanggulangan Bencana</i>	<i>Program Penanggulangan Bencana</i>	Sesuai	1
29	<i>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	<i>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	Sesuai	1
	Sosial	Sosial		
30	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
31	<i>Program Pemberdayaan Sosial</i>	<i>Program Pemberdayaan Sosial</i>	Sesuai	1

32	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	Sesuai	1
33	<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	Sesuai	1
34	<i>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</i>	<i>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</i>	Sesuai	1
35	<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>Program Penanganan Bencana</i>	Sesuai	1
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja		
36	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
37	<i>Program Perencanaan Tenaga Kerja</i>	<i>Program Perencanaan Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1
38	<i>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	<i>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1
39	<i>Program Penempatan Tenaga Kerja</i>	<i>Program Penempatan Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1
40	<i>Program Hubungan Industrial</i>	<i>Program Hubungan Industrial</i>	Sesuai	1
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
41	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
42	<i>Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>	Sesuai	1
43	<i>Program Perlindungan Perempuan</i>	<i>Program Perlindungan Perempuan</i>	Sesuai	1
44	<i>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	<i>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	Sesuai	1
45	<i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</i>	<i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</i>	Sesuai	1
46	<i>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>	<i>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>	Sesuai	1
47	<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>	<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>	Sesuai	1
	Pangan	Pangan		
48	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</i>	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</i>	Sesuai	1
49	<i>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	<i>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	Sesuai	1
50	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	Sesuai	1

51	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	Sesuai	1
	Pertanahan	Pertanahan		
52	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	Sesuai	1
53	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	Sesuai	1
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup		
54	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
55	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
56	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
57	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	Sesuai	1
58	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	Sesuai	1
59	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
60	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
61	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
62	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	Sesuai	1
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil		
63	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
64	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	Sesuai	1
65	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	Sesuai	1
66	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Sesuai	1

67	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	Sesuai	1
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
68	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
69	<i>Program Penataan Desa</i>	<i>Program Penataan Desa</i>	Sesuai	1
70	<i>Program Peningkatan Kerjasama Desa</i>	<i>Program Peningkatan Kerjasama Desa</i>	Sesuai	1
71	<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	Sesuai	1
72	<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</i>	Sesuai	1
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
73	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	Sesuai	1
74	<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>	<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>	Sesuai	1
75	<i>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	Sesuai	1
	Perhubungan	Perhubungan		
76	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
77	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	Sesuai	1
78	<i>Program Pengelolaan Pelayaran</i>	<i>Program Pengelolaan Pelayaran</i>	Sesuai	1
	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika		
79	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
80	<i>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</i>	<i>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</i>	Sesuai	1
81	<i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</i>	<i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</i>	Sesuai	1
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
82	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1

83	<i>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</i>	<i>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</i>	Sesuai	1
84	<i>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</i>	<i>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</i>	Sesuai	1
85	<i>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</i>	<i>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</i>	Sesuai	1
86	<i>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</i>	<i>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</i>	Sesuai	1
87	<i>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</i>	Sesuai	1
88	<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	Sesuai	1
89	<i>Program Pengembangan UMKM</i>	<i>Program Pengembangan UMKM</i>	Sesuai	1
	Penanaman Modal	Penanaman Modal		
90	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
91	<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
92	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
93	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
94	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
95	<i>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
	Kepemudaan Olah Raga	Kepemudaan Olah Raga		
96	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>	Sesuai	1
97	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>	Sesuai	1
98	<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>	Sesuai	1
	Statistik	Statistik		
99	<i>Program Penyelenggaraan Statistik Sektor</i>	<i>Program Penyelenggaraan Statistik Sektor</i>	Sesuai	1

	Persandian	Persandian		
100	<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	Sesuai	1
	Kebudayaan	Kebudayaan		
101	<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	Sesuai	1
102	<i>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</i>	<i>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</i>	Sesuai	1
103	<i>Program Pembinaan Sejarah</i>	<i>Program Pembinaan Sejarah</i>	Sesuai	1
104	<i>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</i>	<i>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</i>	Sesuai	1
105	<i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>	<i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>	Sesuai	1
	Perpustakaan	Perpustakaan		
106	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
107	<i>Program Pembinaan Perpustakaan</i>	<i>Program Pembinaan Perpustakaan</i>	Sesuai	1
	Kearsipan	Kearsipan		
108	<i>Program Pengelolaan Arsip</i>	<i>Program Pengelolaan Arsip</i>	Sesuai	1
109	<i>Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</i>	<i>Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</i>	Sesuai	1
110	<i>Program Perizinan Penggunaan Arsip</i>	<i>Program Perizinan Penggunaan Arsip</i>	Sesuai	1
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan		
111	<i>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</i>	<i>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</i>	Sesuai	1
112	<i>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</i>	<i>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</i>	Sesuai	1
113	<i>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</i>	<i>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</i>	Sesuai	1
114	<i>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	<i>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	Sesuai	1
	Pariwisata	Pariwisata		
115	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
116	<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	Sesuai	1
117	<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	Sesuai	1

118	<i>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>	<i>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>	Sesuai	1
119	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</i>	Sesuai	1
	Pertanian	Pertanian		
120	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Sesuai	1
121	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	Sesuai	1
122	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	Sesuai	1
123	<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	Sesuai	1
124	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	Sesuai	1
125	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	Sesuai	1
126	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	Sesuai	1
	Perdagangan	Perdagangan		
127	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	Sesuai	1
128	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Sesuai	1
129	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	Sesuai	1
130	<i>Program Pengembangan Ekspor</i>	<i>Program Pengembangan Ekspor</i>	Sesuai	1
131	<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>	<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>	Sesuai	1
132	<i>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>	<i>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>	Sesuai	1
	Perindustrian	Perindustrian		
133	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
134	<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>	<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>	Sesuai	1
135	<i>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</i>	<i>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</i>	Sesuai	1

136	<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>	<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>	Sesuai	1
	Transmigrasi	Transmigrasi		
137	<i>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	<i>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	Sesuai	1
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		
138	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
139	<i>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</i>	Sesuai	1
140	<i>Program Perekonomian Dan Pembangunan</i>	<i>Program Perekonomian Dan Pembangunan</i>	Sesuai	1
	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		
141	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
142	<i>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</i>	<i>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</i>	Sesuai	1
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Perencanaan	Perencanaan		
143	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
144	<i>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	<i>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	Sesuai	1
145	<i>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Sesuai	1
	Keuangan	Keuangan		
146	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
147	<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Sesuai	1
148	<i>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	Sesuai	1
149	<i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	<i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	Sesuai	1
	Kepegawaian	Kepegawaian		

150	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
151	<i>Program Kepegawaian Daerah</i>	<i>Program Kepegawaian Daerah</i>	Sesuai	1
	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan		
152	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	Sesuai	1
	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan		
153	<i>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</i>	<i>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</i>	Sesuai	1
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	Inspektorat	Inspektorat		
154	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
155	<i>Program Penyelenggaraan Pengawasan</i>	<i>Program Penyelenggaraan Pengawasan</i>	Sesuai	1
156	<i>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</i>	<i>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</i>	Sesuai	1
G	UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN		
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		
157	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
158	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	Sesuai	1
159	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	Sesuai	1
160	<i>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	<i>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	Sesuai	1
161	<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	Sesuai	1
162	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Sesuai	1
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik		

163	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
164	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	Sesuai	1
165	<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	Sesuai	1
166	<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Sesuai	1
167	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	Sesuai	1
168	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</i>	Sesuai	1
TOTAL SKOR/ NILAI				168

Jumlah Sesuai : 168

Jumlah Tidak Sesuai : 0

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program

= 168 / 168

= 1

b. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA PPAS

NO.	RKPD	KUA PPAS	SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
	URUSAN/ PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM		
1	2	3	4	5
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Pendidikan	Pendidikan		
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
2	<i>Program Pengelolaan Pendidikan</i>	<i>Program Pengelolaan Pendidikan</i>	Sesuai	1
3	<i>Program Pengembangan Kurikulum</i>	<i>Program Pengembangan Kurikulum</i>	Sesuai	1
4	<i>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</i>	<i>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</i>	Sesuai	1

5	<i>Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</i>	<i>Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</i>	Sesuai	1
	Kesehatan	Kesehatan		
6	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
7	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	Sesuai	1
8	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	Sesuai	1
9	<i>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</i>	<i>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</i>	Sesuai	1
10	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</i>	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</i>	Sesuai	1
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
11	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
12	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>	Sesuai	1
13	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	Sesuai	1
14	<i>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>	<i>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>	Sesuai	1
15	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>	Sesuai	1
16	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	Sesuai	1
17	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	Sesuai	1
18	<i>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</i>	<i>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</i>	Sesuai	1
19	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>	Sesuai	1
20	<i>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</i>	<i>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</i>	Sesuai	1
21	<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	Sesuai	1
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		

22	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
23	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	Sesuai	1
24	<i>Program Kawasan Permukiman</i>	<i>Program Kawasan Permukiman</i>	Sesuai	1
25	<i>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</i>	<i>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</i>	Sesuai	1
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
26	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
27	<i>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</i>	<i>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</i>	Sesuai	1
28	<i>Program Penanggulangan Bencana</i>	<i>Program Penanggulangan Bencana</i>	Sesuai	1
29	<i>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	<i>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	Sesuai	1
	Sosial	Sosial		
30	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
31	<i>Program Pemberdayaan Sosial</i>	<i>Program Pemberdayaan Sosial</i>	Sesuai	1
32	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	Sesuai	1
33	<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	Sesuai	1
34	<i>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</i>	<i>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</i>	Sesuai	1
35	<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>Program Penanganan Bencana</i>	Sesuai	1
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja		
36	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
37	<i>Program Perencanaan Tenaga Kerja</i>	<i>Program Perencanaan Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1
38	<i>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	<i>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1

39	<i>Program Penempatan Tenaga Kerja</i>	<i>Program Penempatan Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1
40	<i>Program Hubungan Industrial</i>	<i>Program Hubungan Industrial</i>	Sesuai	1
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
41	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
42	<i>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>	Sesuai	1
43	<i>Program Perlindungan Perempuan</i>	<i>Program Perlindungan Perempuan</i>	Sesuai	1
44	<i>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	<i>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	Sesuai	1
45	<i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</i>	<i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</i>	Sesuai	1
46	<i>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>	<i>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>	Sesuai	1
47	<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>	<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>	Sesuai	1
	Pangan	Pangan		
48	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</i>	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</i>	Sesuai	1
49	<i>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	<i>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	Sesuai	1
50	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	Sesuai	1
51	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	Sesuai	1
	Pertanahan	Pertanahan		
52	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	Sesuai	1
53	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	Sesuai	1
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup		
54	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
55	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
56	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1

57	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	Sesuai	1
58	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	Sesuai	1
59	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
60	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
61	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
62	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	Sesuai	1
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil		
63	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
64	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	Sesuai	1
65	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	Sesuai	1
66	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Sesuai	1
67	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	Sesuai	1
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
68	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
69	<i>Program Penataan Desa</i>	<i>Program Penataan Desa</i>	Sesuai	1
70	<i>Program Peningkatan Kerjasama Desa</i>	<i>Program Peningkatan Kerjasama Desa</i>	Sesuai	1
71	<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	Sesuai	1
72	<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</i>	Sesuai	1
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

73	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	Sesuai	1
74	<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>	<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>	Sesuai	1
75	<i>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	Sesuai	1
	Perhubungan	Perhubungan		
76	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
77	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	Sesuai	1
78	<i>Program Pengelolaan Pelayaran</i>	<i>Program Pengelolaan Pelayaran</i>	Sesuai	1
	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika		
79	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
80	<i>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</i>	<i>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</i>	Sesuai	1
81	<i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</i>	<i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</i>	Sesuai	1
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
82	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
83	<i>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</i>	<i>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</i>	Sesuai	1
84	<i>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</i>	<i>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</i>	Sesuai	1
85	<i>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</i>	<i>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</i>	Sesuai	1
86	<i>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</i>	<i>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</i>	Sesuai	1
87	<i>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</i>	Sesuai	1
88	<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	Sesuai	1
89	<i>Program Pengembangan UMKM</i>	<i>Program Pengembangan UMKM</i>	Sesuai	1
	Penanaman Modal	Penanaman Modal		

90	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
91	<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
92	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
93	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
94	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
95	<i>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga		
96	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>	Sesuai	1
97	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>	Sesuai	1
98	<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>	Sesuai	1
	Statistik	Statistik		
99	<i>Program Penyelenggaraan Statistik Sektor</i>	<i>Program Penyelenggaraan Statistik Sektor</i>	Sesuai	1
	Persandian	Persandian		
100	<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	Sesuai	1
	Kebudayaan	Kebudayaan		
101	<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	Sesuai	1
102	<i>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</i>	<i>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</i>	Sesuai	1
103	<i>Program Pembinaan Sejarah</i>	<i>Program Pembinaan Sejarah</i>	Sesuai	1
104	<i>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</i>	<i>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</i>	Sesuai	1
105	<i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>	<i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>	Sesuai	1
	Perpustakaan	Perpustakaan		
106	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
107	<i>Program Pembinaan Perpustakaan</i>	<i>Program Pembinaan Perpustakaan</i>	Sesuai	1

	Kearsipan	Kearsipan		
108	<i>Program Pengelolaan Arsip</i>	<i>Program Pengelolaan Arsip</i>	Sesuai	1
109	<i>Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</i>	<i>Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</i>	Sesuai	1
110	<i>Program Perizinan Penggunaan Arsip</i>	<i>Program Perizinan Penggunaan Arsip</i>	Sesuai	1
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan		
111	<i>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</i>	<i>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</i>	Sesuai	1
112	<i>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</i>	<i>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</i>	Sesuai	1
113	<i>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</i>	<i>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</i>	Sesuai	1
114	<i>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	<i>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	Sesuai	1
	Pariwisata	Pariwisata		
115	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
116	<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	Sesuai	1
117	<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	Sesuai	1
118	<i>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>	<i>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>	Sesuai	1
119	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</i>	Sesuai	1
	Pertanian	Pertanian		
120	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Sesuai	1
121	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	Sesuai	1
122	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	Sesuai	1
123	<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	Sesuai	1
124	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	Sesuai	1

125	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	Sesuai	1
126	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	Sesuai	1
	Perdagangan	Perdagangan		
127	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	Sesuai	1
128	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Sesuai	1
129	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	Sesuai	1
130	<i>Program Pengembangan Ekspor</i>	<i>Program Pengembangan Ekspor</i>	Sesuai	1
131	<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>	<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>	Sesuai	1
132	<i>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>	<i>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>	Sesuai	1
	Perindustrian	Perindustrian		
133	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
134	<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>	<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>	Sesuai	1
135	<i>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</i>	<i>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</i>	Sesuai	1
136	<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>	<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>	Sesuai	1
	Transmigrasi	Transmigrasi		
137	<i>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	<i>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	Sesuai	1
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		
138	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
139	<i>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</i>	Sesuai	1
140	<i>Program Perekonomian Dan Pembangunan</i>	<i>Program Perekonomian Dan Pembangunan</i>	Sesuai	1
	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		
141	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1

142	<i>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</i>	<i>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</i>	Sesuai	1
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Perencanaan	Perencanaan		
143	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
144	<i>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	<i>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	Sesuai	1
145	<i>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Sesuai	1
	Keuangan	Keuangan		
146	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
147	<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Sesuai	1
148	<i>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	Sesuai	1
149	<i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	<i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	Sesuai	1
	Kepegawaian	Kepegawaian		
150	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
151	<i>Program Kepegawaian Daerah</i>	<i>Program Kepegawaian Daerah</i>	Sesuai	1
	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan		
152	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	Sesuai	1
	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan		
153	<i>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</i>	<i>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</i>	Sesuai	1
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	Inspektorat	Inspektorat		
154	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1

155	<i>Program Penyelenggaraan Pengawasan</i>	<i>Program Penyelenggaraan Pengawasan</i>	Sesuai	1
156	<i>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</i>	<i>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</i>	Sesuai	1
G	UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN		
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		
157	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
158	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	Sesuai	1
159	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	Sesuai	1
160	<i>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	<i>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	Sesuai	1
161	<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	Sesuai	1
162	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Sesuai	1
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik		
163	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
164	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	Sesuai	1
165	<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	Sesuai	1
166	<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Sesuai	1
167	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	Sesuai	1
168	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	Sesuai	1
TOTAL SKOR/ NILAI				168

Jumlah Sesuai : 168

Jumlah Tidak Sesuai : 0

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program

= 168 / 168

= 1

c. Kesesuaian Nomenklatur Program KUA PPAS dan APBD

NO.	KUA PPAS	APBD	SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
	URUSAN/ PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM		
1	2	3	4	5
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Pendidikan	Pendidikan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Sesuai	1
3	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Sesuai	1
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Sesuai	1
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Sesuai	1
	Kesehatan	Kesehatan		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sesuai	1
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sesuai	1
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Sesuai	1
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sesuai	1
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

11	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
12	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>	Sesuai	1
13	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	Sesuai	1
14	<i>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>	<i>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>	Sesuai	1
15	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>	Sesuai	1
16	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	Sesuai	1
17	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	Sesuai	1
18	<i>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</i>	<i>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</i>	Sesuai	1
19	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>	Sesuai	1
20	<i>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</i>	<i>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</i>	Sesuai	1
21	<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	Sesuai	1
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
22	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
23	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	Sesuai	1
24	<i>Program Kawasan Permukiman</i>	<i>Program Kawasan Permukiman</i>	Sesuai	1
25	<i>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</i>	<i>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</i>	Sesuai	1
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
26	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
27	<i>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</i>	<i>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</i>	Sesuai	1
28	<i>Program Penanggulangan Bencana</i>	<i>Program Penanggulangan Bencana</i>	Sesuai	1
29	<i>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	<i>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	Sesuai	1

	Sosial	Sosial		
30	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
31	<i>Program Pemberdayaan Sosial</i>	<i>Program Pemberdayaan Sosial</i>	Sesuai	1
32	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	Sesuai	1
33	<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	Sesuai	1
34	<i>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</i>	<i>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</i>	Sesuai	1
35	<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>Program Penanganan Bencana</i>	Sesuai	1
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja		
36	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
37	<i>Program Perencanaan Tenaga Kerja</i>	<i>Program Perencanaan Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1
38	<i>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	<i>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1
39	<i>Program Penempatan Tenaga Kerja</i>	<i>Program Penempatan Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1
40	<i>Program Hubungan Industrial</i>	<i>Program Hubungan Industrial</i>	Sesuai	1
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
41	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
42	<i>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>	Sesuai	1
43	<i>Program Perlindungan Perempuan</i>	<i>Program Perlindungan Perempuan</i>	Sesuai	1
44	<i>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	<i>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	Sesuai	1
45	<i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</i>	<i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</i>	Sesuai	1
46	<i>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>	<i>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>	Sesuai	1
47	<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>	<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>	Sesuai	1
	Pangan	Pangan		

48	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</i>	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</i>	Sesuai	1
49	<i>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	<i>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	Sesuai	1
50	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	Sesuai	1
51	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	Sesuai	1
	Pertanahan	Pertanahan		
52	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	Sesuai	1
53	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	Sesuai	1
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup		
54	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
55	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
56	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
57	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	Sesuai	1
58	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	Sesuai	1
59	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
60	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
61	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
62	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	Sesuai	1
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil		

63	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
64	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	Sesuai	1
65	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	Sesuai	1
66	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Sesuai	1
67	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	Sesuai	1
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
68	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
69	<i>Program Penataan Desa</i>	<i>Program Penataan Desa</i>	Sesuai	1
70	<i>Program Peningkatan Kerjasama Desa</i>	<i>Program Peningkatan Kerjasama Desa</i>	Sesuai	1
71	<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	Sesuai	1
72	<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</i>	Sesuai	1
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
73	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	Sesuai	1
74	<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>	<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>	Sesuai	1
75	<i>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	Sesuai	1
	Perhubungan	Perhubungan		
76	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
77	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	Sesuai	1
78	<i>Program Pengelolaan Pelayaran</i>	<i>Program Pengelolaan Pelayaran</i>	Sesuai	1
	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika		
79	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
80	<i>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</i>	<i>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</i>	Sesuai	1

81	<i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</i>	<i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</i>	Sesuai	1
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
82	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
83	<i>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</i>	<i>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</i>	Sesuai	1
84	<i>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</i>	<i>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</i>	Sesuai	1
85	<i>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</i>	<i>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</i>	Sesuai	1
86	<i>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</i>	<i>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</i>	Sesuai	1
87	<i>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</i>	Sesuai	1
88	<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	Sesuai	1
89	<i>Program Pengembangan UMKM</i>	<i>Program Pengembangan UMKM</i>	Sesuai	1
	Penanaman Modal	Penanaman Modal		
90	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
91	<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
92	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
93	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
94	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
95	<i>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga		
96	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>	Sesuai	1
97	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>	Sesuai	1
98	<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>	Sesuai	1

	Statistik	Statistik		
99	<i>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>	<i>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>	Sesuai	1
	Persandian	Persandian		
100	<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	Sesuai	1
	Kebudayaan	Kebudayaan		
101	<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	Sesuai	1
102	<i>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</i>	<i>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</i>	Sesuai	1
103	<i>Program Pembinaan Sejarah</i>	<i>Program Pembinaan Sejarah</i>	Sesuai	1
104	<i>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</i>	<i>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</i>	Sesuai	1
105	<i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>	<i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>	Sesuai	1
	Perpustakaan	Perpustakaan		
106	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
107	<i>Program Pembinaan Perpustakaan</i>	<i>Program Pembinaan Perpustakaan</i>	Sesuai	1
	Kearsipan	Kearsipan		
108	<i>Program Pengelolaan Arsip</i>	<i>Program Pengelolaan Arsip</i>	Sesuai	1
109	<i>Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</i>	<i>Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</i>	Sesuai	1
110	<i>Program Perizinan Penggunaan Arsip</i>	<i>Program Perizinan Penggunaan Arsip</i>	Sesuai	1
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan		
111	<i>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</i>	<i>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</i>	Sesuai	1
112	<i>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</i>	<i>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</i>	Sesuai	1
113	<i>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</i>	<i>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</i>	Sesuai	1
114	<i>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	<i>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	Sesuai	1
	Pariwisata	Pariwisata		
115	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1

116	<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	Sesuai	1
117	<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	Sesuai	1
118	<i>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>	<i>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>	Sesuai	1
119	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</i>	Sesuai	1
	Pertanian	Pertanian		
120	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Sesuai	1
121	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	Sesuai	1
122	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	Sesuai	1
123	<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	Sesuai	1
124	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	Sesuai	1
125	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	Sesuai	1
126	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	Sesuai	1
	Perdagangan	Perdagangan		
127	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	Sesuai	1
128	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Sesuai	1
129	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	Sesuai	1
130	<i>Program Pengembangan Ekspor</i>	<i>Program Pengembangan Ekspor</i>	Sesuai	1
131	<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>	<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>	Sesuai	1
132	<i>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>	<i>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>	Sesuai	1
	Perindustrian	Perindustrian		
133	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1

134	<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>	<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>	Sesuai	1
135	<i>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</i>	<i>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</i>	Sesuai	1
136	<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>	<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>	Sesuai	1
	Transmigrasi	Transmigrasi		
137	<i>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	<i>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	Sesuai	1
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		
138	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
139	<i>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</i>	Sesuai	1
140	<i>Program Perekonomian Dan Pembangunan</i>	<i>Program Perekonomian Dan Pembangunan</i>	Sesuai	1
	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		
141	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
142	<i>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</i>	<i>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</i>	Sesuai	1
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Perencanaan	Perencanaan		
143	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
144	<i>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	<i>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	Sesuai	1
145	<i>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Sesuai	1
	Keuangan	Keuangan		
146	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
147	<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Sesuai	1
148	<i>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	Sesuai	1

149	<i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	<i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	Sesuai	1
	Kepegawaian	Kepegawaian		
150	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
151	<i>Program Kepegawaian Daerah</i>	<i>Program Kepegawaian Daerah</i>	Sesuai	1
	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan		
152	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	Sesuai	1
	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan		
153	<i>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</i>	<i>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</i>	Sesuai	1
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	Inspektorat	Inspektorat		
154	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
155	<i>Program Penyelenggaraan Pengawasan</i>	<i>Program Penyelenggaraan Pengawasan</i>	Sesuai	1
156	<i>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</i>	<i>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</i>	Sesuai	1
G	UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN		
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		
157	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
158	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	Sesuai	1
159	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	Sesuai	1
160	<i>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	<i>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	Sesuai	1
161	<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	Sesuai	1
162	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Sesuai	1

H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik		
163	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
164	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	Sesuai	1
165	<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	Sesuai	1
166	<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Sesuai	1
167	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	Sesuai	1
168	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	Sesuai	1
TOTAL SKOR/ NILAI				168

Jumlah Sesuai : 168

Jumlah Tidak Sesuai : 0

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program
 = 168 / 168
 = 1

d. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA PPAS

RKPD		KUA-PPAS		SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
URUSAN	PAGU	URUSAN	PAGU		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.697.259.469.393,83	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.720.131.701.965,83		
Pendidikan	852.597.891.713,16	Pendidikan	821.887.227.089,16		

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	681.961.762.105,16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	647.536.619.481,16	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Pendidikan	154.400.948.558,00	Program Pengelolaan Pendidikan	154.400.948.558,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Kurikulum	373.176.900,00	Program Pengembangan Kurikulum	373.176.900,00	Sesuai	1
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	15.776.110.150,00	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	15.776.110.150,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	85.894.000,00	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	85.894.000,00	Sesuai	1
Kesehatan	541.823.951.086,67	Kesehatan	543.635.572.322,67		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	403.264.747.501,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	402.501.402.501,67	Tidak Sesuai	0
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	130.818.837.085,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	133.257.439.696,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.630.139.500,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.638.639.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	253.302.000,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	236.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.856.925.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.002.090.625,00	Tidak Sesuai	0
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	210.346.385.609,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	241.377.721.019,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.790.807.261,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.604.972.665,00	Tidak Sesuai	0

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	22.998.385.000,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	40.690.165.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.277.530.348,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.874.856.344,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	203.630.000,00	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	203.630.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.782.810.227,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.879.038.241,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	57.869.078.415,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	44.597.412.815,00	Tidak Sesuai	0
Program Penataan Bangunan Gedung	6.412.731.194,00	Program Penataan Bangunan Gedung	6.162.833.924,00	Tidak Sesuai	0
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	370.169.468,00	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	620.066.738,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Jalan	95.052.998.046,00	Program Penyelenggaraan Jalan	120.408.367.622,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	93.080.750,00	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	93.080.750,00	Sesuai	1
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	495.164.900,00	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.243.296.920,00	Tidak Sesuai	0
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	59.133.154.901,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	74.343.443.891,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.170.082.220,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.610.224.184,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Perumahan	176.249.500,00	Program Pengembangan Perumahan	176.249.500,00	Sesuai	1
Program Kawasan Permukiman	52.595.375.181,00	Program Kawasan Permukiman	67.444.572.207,00	Tidak Sesuai	0

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	191.448.000,00	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	112.398.000,00	Tidak Sesuai	0
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.423.325.726,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.264.671.126,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.372.004.775,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.280.361.855,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.505.788.220,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.505.788.220,00	Sesuai	1
Program Penanggulangan Bencana	2.638.183.272,00	Program Penanggulangan Bencana	2.571.171.592,00	Tidak Sesuai	0
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	907.349.459,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	907.349.459,00	Sesuai	1
Sosial	14.934.760.358,00	Sosial	20.623.066.518,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.062.265.520,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.013.789.708,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Sosial	2.718.036.100,00	Program Pemberdayaan Sosial	2.657.380.400,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	66.407.500,00	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	66.407.500,00	Sesuai	1
Program Rehabilitasi Sosial	795.435.800,00	Program Rehabilitasi Sosial	692.962.450,00	Tidak Sesuai	0
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.303.605.938,00	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10.128.034.960,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanganan Bencana	989.009.500,00	Program Penanganan Bencana	1.064.491.500,00	Tidak Sesuai	0

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	140.465.030.338,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	143.847.005.197,00		
Tenaga Kerja	8.386.456.892,00	Tenaga Kerja	8.077.616.892,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.260.124.092,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.121.760.672,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Tenaga Kerja	166.900.000,00	Program Perencanaan Tenaga Kerja	160.610.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.307.388.000,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	960.776.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Penempatan Tenaga Kerja	2.468.600.000,00	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.662.600.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Hubungan Industrial	183.444.800,00	Program Hubungan Industrial	171.870.220,00	Tidak Sesuai	0
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.458.551.321,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.361.718.571,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.273.155.071,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.126.322.321,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	414.039.850,00	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	414.039.850,00	Sesuai	1
Program Perlindungan Perempuan	208.202.300,00	Program Perlindungan Perempuan	208.202.300,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	68.050.000,00	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	68.050.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	63.461.150,00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	63.461.150,00	Sesuai	1
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	66.643.000,00	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	66.643.000,00	Sesuai	1

Program Perlindungan Khusus Anak	364.999.950,00	Program Perlindungan Khusus Anak	414.999.950,00	Tidak Sesuai	0
Pangan	6.355.723.500,00	Pangan	6.304.347.500,00		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.050.000.000,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.050.000.000,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.172.232.000,00	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.128.049.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanganan Kerawanan Pangan	40.000.000,00	Program Penanganan Kerawanan Pangan	40.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengawasan Keamanan Pangan	93.491.500,00	Program Pengawasan Keamanan Pangan	86.298.500,00	Tidak Sesuai	0
Pertanahan	6.210.470.800,00	Pertanahan	4.592.474.600,00		
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.399.184.800,00	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.240.944.600,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	4.811.286.000,00	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.351.530.000,00	Tidak Sesuai	0
Lingkungan Hidup	17.731.347.812,00	Lingkungan Hidup	18.770.843.812,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.143.636.080,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.187.132.080,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	232.640.000,00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	222.640.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.445.115.116,00	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.581.342.616,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.940.593.370,00	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.340.593.370,00	Tidak Sesuai	0

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	237.902.430,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	243.674.930,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	843.498.340,00	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	933.498.340,00	Tidak Sesuai	0
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	74.082.000,00	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	74.082.000,00	Sesuai	1
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	22.480.500,00	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.480.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Persampahan	5.791.399.976,00	Program Pengelolaan Persampahan	6.167.399.976,00	Tidak Sesuai	0
Administrasi Kependudukan dan Capil	11.784.474.760,00	Administrasi Kependudukan dan Capil	11.860.507.219,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.495.625.260,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.678.326.905,00	Tidak Sesuai	0
Program Pendaftaran Penduduk	1.386.323.000,00	Program Pendaftaran Penduduk	1.329.902.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pencatatan Sipil	64.617.000,00	Program Pencatatan Sipil	56.781.800,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.791.409.500,00	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.748.996.014,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	46.500.000,00	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	46.500.000,00	Sesuai	1
Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.203.250.915,00	Pemberdayaan Masyarakat Desa	15.201.227.515,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.829.945.431,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.877.944.881,00	Tidak Sesuai	0

Program Penataan Desa	47.034.000,00	Program Penataan Desa	47.034.000,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Kerjasama Desa	971.951.504,00	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.271.951.504,00	Tidak Sesuai	0
Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.145.519.980,00	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.145.497.130,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.208.800.000,00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.858.800.000,00	Tidak Sesuai	0
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.545.654.530,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.544.463.280,00		
Program Pengendalian Penduduk	243.321.200,00	Program Pengendalian Penduduk	242.129.950,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.731.761.000,00	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.731.761.000,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.570.572.330,00	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.570.572.330,00	Sesuai	1
Perhubungan	18.856.470.709,00	Perhubungan	20.828.116.709,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.759.597.989,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.663.856.854,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.082.141.720,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.146.906.855,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Pelayaran	14.731.000,00	Program Pengelolaan Pelayaran	17.353.000,00	Tidak Sesuai	0
Komunikasi Informatika	12.769.549.267,00	Komunikasi Informatika	13.627.007.023,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.779.500.817,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.906.510.003,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.564.026.850,00	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.379.626.850,00	Tidak Sesuai	0

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.426.021.600,00	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.340.870.170,00	Tidak Sesuai	0
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.961.129.281,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.200.153.281,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.290.647.883,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.443.990.593,00	Tidak Sesuai	0
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	142.103.000,00	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	154.083.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	303.889.800,00	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	312.214.400,00	Tidak Sesuai	0
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	93.571.400,00	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0,00	Tidak Sesuai	0
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	818.343.793,00	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	794.022.653,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	584.213.550,00	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	485.722.910,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	836.055.105,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.024.725.975,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan UMKM	892.304.750,00	Program Pengembangan UMKM	985.393.750,00	Tidak Sesuai	0
Penanaman Modal	6.204.466.559,00	Penanaman Modal	6.125.549.559,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.563.661.559,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.204.810.059,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	273.293.500,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	273.293.500,00	Sesuai	1
Program Promosi Penanaman Modal	455.106.000,00	Program Promosi Penanaman Modal	451.520.500,00	Tidak Sesuai	0

Program Pelayanan Penanaman Modal	373.189.300,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	653.189.300,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	427.116.500,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	430.636.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	112.099.700,00	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	112.099.700,00	Sesuai	1
Kepemudaan dan Olah Raga	4.800.000.000,00	Kepemudaan dan Olah Raga	4.860.009.000,00		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	883.500.000,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	904.121.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.325.665.000,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.369.882.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	590.835.000,00	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	586.005.000,00	Tidak Sesuai	0
Statistik	880.453.848,00	Statistik	816.052.091,00		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	880.453.848,00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	816.052.091,00	Tidak Sesuai	0
Persandian	33.634.632,00	Persandian	33.634.633,00		
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	33.634.632,00	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	33.634.633,00	Tidak Sesuai	0
Kebudayaan	2.452.000.000,00	Kebudayaan	2.832.000.000,00		
Program Pengembangan Kebudayaan	1.017.000.000,00	Program Pengembangan Kebudayaan	1.084.616.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	510.000.000,00	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	851.800.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Sejarah	75.000.000,00	Program Pembinaan Sejarah	25.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	100.000.000,00	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	94.800.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Permuseuman	750.000.000,00	Program Pengelolaan Permuseuman	775.784.000,00	Tidak Sesuai	0
Perpustakaan	4.245.449.612,00	Perpustakaan	4.245.319.612,00		

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.181.213.783,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.215.600.312,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Perpustakaan	1.064.235.829,00	Program Pembinaan Perpustakaan	1.029.719.300,00	Tidak Sesuai	0
Kearsipan	585.945.900,00	Kearsipan	565.963.900,00		
Program Pengelolaan Arsip	545.665.650,00	Program Pengelolaan Arsip	521.771.900,00	Tidak Sesuai	0
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	20.280.250,00	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	30.080.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Perizinan Penggunaan Arsip	20.000.000,00	Program Perizinan Penggunaan Arsip	14.112.000,00	Tidak Sesuai	0
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	97.220.621.737,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	111.769.973.248,00		
Kelautan dan Perikanan	1.322.671.000,00	Kelautan dan Perikanan	1.712.565.300,00		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	465.594.500,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	569.779.800,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	622.034.500,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	607.743.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	15.069.000,00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	15.069.000,00	Sesuai	1
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	219.973.000,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	519.973.000,00	Tidak Sesuai	0
Pariwisata	12.349.538.349,00	Pariwisata	12.770.620.149,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.146.538.349,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.067.620.149,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.400.000.000,00	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.424.325.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemasaran Pariwisata	600.773.000,00	Program Pemasaran Pariwisata	600.773.000,00	Sesuai	1

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	274.617.000,00	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	279.706.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.927.610.000,00	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.398.196.000,00	Tidak Sesuai	0
Pertanian	71.186.476.220,00	Pertanian	84.492.262.831,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.338.730.055,09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.302.495.444,09	Tidak Sesuai	0
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.617.751.485,91	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.425.715.535,91	Tidak Sesuai	0
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.534.946.129,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	15.986.374.801,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.020.696.250,00	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.905.696.250,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	176.050.000,00	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	176.050.000,00	Sesuai	1
Program Perizinan Usaha Pertanian	4.200.000,00	Program Perizinan Usaha Pertanian	4.200.000,00	Sesuai	1
Program Penyuluhan Pertanian	8.494.102.300,00	Program Penyuluhan Pertanian	12.691.730.800,00	Tidak Sesuai	0
Perdagangan	2.289.093.169,00	Perdagangan	2.858.866.169,00		
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	16.650.000,00	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	27.100.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	999.973.600,00	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.570.723.600,00	Tidak Sesuai	0

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	208.248.050,00	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	211.354.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Ekspor	716.435.300,00	Program Pengembangan Ekspor	699.271.950,00	Tidak Sesuai	0
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	333.093.619,00	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	332.116.619,00	Tidak Sesuai	0
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	14.692.600,00	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	18.300.000,00	Tidak Sesuai	0
Perindustrian	9.818.556.999,00	Perindustrian	9.681.372.799,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.877.222.999,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.740.138.799,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	842.241.500,00	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	842.141.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	0,00	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	0,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	99.092.500,00	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	99.092.500,00	Sesuai	1
Transmigrasi	254.286.000,00	Transmigrasi	254.286.000,00		
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	254.286.000,00	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	254.286.000,00	Sesuai	1
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	112.949.753.525,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	115.292.721.125,00		
Sekretariat Daerah	48.034.530.712,00	Sekretariat Daerah	50.413.964.512,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.806.540.389,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.945.375.589,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13.186.092.480,00	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14.306.691.080,00	Tidak Sesuai	0

Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.041.897.843,00	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.161.897.843,00	Tidak Sesuai	0
Sekretariat DPRD	64.915.222.813,00	Sekretariat DPRD	64.878.756.613,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.067.099.362,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.245.968.062,00	Tidak Sesuai	0
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	48.848.123.451,00	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	48.632.788.551,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	474.355.161.742,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	480.955.119.685,00		
Perencanaan	8.690.685.741,00	Perencanaan	8.318.282.766,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.978.986.041,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.887.434.136,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.387.154.820,00	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.090.207.750,00	Tidak Sesuai	0
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.324.544.880,00	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.340.640.880,00	Tidak Sesuai	0
Keuangan	450.680.644.213,00	Keuangan	457.313.270.956,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.423.011.220,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.238.792.909,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	385.516.523.808,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	389.789.229.872,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.912.823.300,00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.147.323.300,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.828.285.885,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.137.924.875,00	Tidak Sesuai	0
Kepegawaian	9.503.755.603,00	Kepegawaian	9.719.706.403,00		

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.578.361.653,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.794.311.703,00	Tidak Sesuai	0
Program Kepegawaian Daerah	2.925.393.950,00	Program Kepegawaian Daerah	2.925.394.700,00	Tidak Sesuai	0
Pendidikan dan Pelatihan	2.438.145.560,00	Pendidikan dan Pelatihan	2.411.561.560,00		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.438.145.560,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.411.561.560,00	Tidak Sesuai	0
Penelitian dan Pengembangan	3.041.930.625,00	Penelitian dan Pengembangan	3.192.298.000,00		
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.041.930.625,00	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.192.298.000,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.870.696.754,00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.007.154.754,00		
Inspektorat	14.870.696.754,00	Inspektorat	15.007.154.754,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.566.119.754,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.559.011.254,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.808.158.000,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.873.504.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.496.419.000,00	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.574.639.000,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR KEWILAYAHAN	91.700.603.957,00	UNSUR KEWILAYAHAN	90.249.608.557,00		
Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	91.700.603.957,00	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	90.249.608.557,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64.575.887.617,64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.778.425.967,64	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	280.874.400,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	258.519.400,00	Tidak Sesuai	0

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.990.637.239,36	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.958.012.789,36	Tidak Sesuai	0
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.056.240.700,00	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	507.723.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	610.941.400,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	590.716.800,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.186.022.600,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.156.210.100,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	10.469.577.780,00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.726.933.780,00		
Kesatuan Bangsa dan Politik	10.469.577.780,00	Kesatuan Bangsa dan Politik	11.726.933.780,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.234.402.280,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.306.008.218,00	Tidak Sesuai	0
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	308.037.500,00	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	329.592.550,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.397.088.000,00	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.372.155.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.070.605.000,00	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.285.637.512,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	253.647.500,00	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	234.327.500,00	Tidak Sesuai	0

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	205.797.500,00	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	199.212.500,00	Tidak Sesuai	0
TOTAL SKOR/ NILAI					31

Jumlah Sesuai : 31

Jumlah Tidak Sesuai : 137

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program

= 31 / 168

= 0,18

e. Kesesuaian Pagu Program KUA PPAS dan APBD

KUA PPAS		KUA-PPAS		SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
URUSAN	PAGU	URUSAN	PAGU		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.720.131.701.965,83	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.726.630.725.765,83		
Pendidikan	821.887.227.089,16	Pendidikan	817.017.473.049,16		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	647.536.619.481,16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	642.680.957.441,16	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Pendidikan	154.400.948.558,00	Program Pengelolaan Pendidikan	158.101.334.558,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kurikulum	373.176.900,00	Program Pengembangan Kurikulum	373.176.900,00	Sesuai	1
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	15.776.110.150,00	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	15.776.110.150,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	85.894.000,00	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	85.894.000,00	Sesuai	1
Kesehatan	543.635.572.322,67	Kesehatan	543.271.476.322,67		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	402.501.402.501,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	401.949.106.501,67	Tidak Sesuai	0

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	133.257.439.696,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	133.312.439.696,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.638.639.500,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.771.839.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	236.000.000,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	236.000.000,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.002.090.625,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.002.090.625,00	Sesuai	1
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	241.377.721.019,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	244.757.907.619,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.604.972.665,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.866.182.241,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	40.690.165.000,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	42.669.369.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.874.856.344,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.834.356.344,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	203.630.000,00	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	203.630.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.879.038.241,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.879.038.241,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	44.597.412.815,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	46.216.472.415,00	Tidak Sesuai	0
Program Penataan Bangunan Gedung	6.162.833.924,00	Program Penataan Bangunan Gedung	7.055.682.924,00	Tidak Sesuai	0
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	620.066.738,00	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	620.066.738,00	Sesuai	1
Program Penyelenggaraan Jalan	120.408.367.622,00	Program Penyelenggaraan Jalan	119.076.732.046,00	Tidak Sesuai	0

Program Pengembangan Jasa Konstruksi	93.080.750,00	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	93.080.750,00	Sesuai	1
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.243.296.920,00	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.243.296.920,00	Sesuai	1
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	74.343.443.891,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	80.983.353.091,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.610.224.184,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.595.160.824,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Perumahan	176.249.500,00	Program Pengembangan Perumahan	176.249.500,00	Sesuai	1
Program Kawasan Permukiman	67.444.572.207,00	Program Kawasan Permukiman	74.099.544.767,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	112.398.000,00	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	112.398.000,00	Sesuai	1
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.264.671.126,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.844.997.126,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.280.361.855,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.432.521.855,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.505.788.220,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.505.813.220,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanggulangan Bencana	2.571.171.592,00	Program Penanggulangan Bencana	2.999.797.592,00	Tidak Sesuai	0
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	907.349.459,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	906.864.459,00	Tidak Sesuai	0
Sosial	20.623.066.518,00	Sosial	21.755.518.558,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.013.789.708,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.999.990.908,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Sosial	2.657.380.400,00	Program Pemberdayaan Sosial	2.956.275.200,00	Tidak Sesuai	0

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	66.407.500,00	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	66.407.500,00	Sesuai	1
Program Rehabilitasi Sosial	692.962.450,00	Program Rehabilitasi Sosial	777.157.450,00	Tidak Sesuai	0
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10.128.034.960,00	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10.907.151.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanganan Bencana	1.064.491.500,00	Program Penanganan Bencana	1.048.536.500,00	Tidak Sesuai	0
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	143.847.005.197,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	141.369.682.397,00		
Tenaga Kerja	8.077.616.892,00	Tenaga Kerja	8.020.998.892,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.121.760.672,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.115.142.672,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Tenaga Kerja	160.610.000,00	Program Perencanaan Tenaga Kerja	160.610.000,00	Sesuai	1
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	960.776.000,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	960.776.000,00	Sesuai	1
Program Penempatan Tenaga Kerja	2.662.600.000,00	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.612.600.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Hubungan Industrial	171.870.220,00	Program Hubungan Industrial	171.870.220,00	Sesuai	1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.361.718.571,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.354.013.571,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.126.322.321,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.118.617.321,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	414.039.850,00	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	414.039.850,00	Sesuai	1
Program Perlindungan Perempuan	208.202.300,00	Program Perlindungan Perempuan	208.202.300,00	Sesuai	1

Program Peningkatan Kualitas Keluarga	68.050.000,00	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	68.050.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	63.461.150,00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	63.461.150,00	Sesuai	1
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	66.643.000,00	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	66.643.000,00	Sesuai	1
Program Perlindungan Khusus Anak	414.999.950,00	Program Perlindungan Khusus Anak	414.999.950,00	Sesuai	1
Pangan	6.304.347.500,00	Pangan	7.152.627.500,00		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.050.000.000,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.050.000.000,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.128.049.000,00	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.976.329.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanganan Kerawanan Pangan	40.000.000,00	Program Penanganan Kerawanan Pangan	40.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengawasan Keamanan Pangan	86.298.500,00	Program Pengawasan Keamanan Pangan	86.298.500,00	Sesuai	1
Pertanahan	4.592.474.600,00	Pertanahan	2.040.789.800,00		
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.240.944.600,00	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.748.059.800,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.351.530.000,00	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	292.730.000,00	Tidak Sesuai	0
Lingkungan Hidup	18.770.843.812,00	Lingkungan Hidup	18.760.915.812,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.187.132.080,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.177.204.080,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	222.640.000,00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	222.640.000,00	Sesuai	1

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.581.342.616,00	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.581.342.616,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.340.593.370,00	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.340.593.370,00	Sesuai	1
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	243.674.930,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	243.674.930,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	933.498.340,00	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	933.498.340,00	Sesuai	1
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	74.082.000,00	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	74.082.000,00	Sesuai	1
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.480.500,00	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.480.500,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Persampahan	6.167.399.976,00	Program Pengelolaan Persampahan	6.167.399.976,00	Sesuai	1
Administrasi Kependudukan dan Capil	11.860.507.219,00	Administrasi Kependudukan dan Capil	11.005.260.219,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.678.326.905,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.853.959.905,00	Tidak Sesuai	0
Program Pendaftaran Penduduk	1.329.902.500,00	Program Pendaftaran Penduduk	1.299.022.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pencatatan Sipil	56.781.800,00	Program Pencatatan Sipil	56.781.800,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.748.996.014,00	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.748.996.014,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	46.500.000,00	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	46.500.000,00	Sesuai	1
Pemberdayaan Masyarakat Desa	15.201.227.515,00	Pemberdayaan Masyarakat Desa	15.194.205.515,00		

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.877.944.881,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.870.922.881,00	Tidak Sesuai	0
Program Penataan Desa	47.034.000,00	Program Penataan Desa	47.034.000,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.271.951.504,00	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.271.951.504,00	Sesuai	1
Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.145.497.130,00	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.145.497.130,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.858.800.000,00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.858.800.000,00	Sesuai	1
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.544.463.280,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.544.463.280,00		
Program Pengendalian Penduduk	242.129.950,00	Program Pengendalian Penduduk	242.129.950,00	Sesuai	1
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.731.761.000,00	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.731.761.000,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.570.572.330,00	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.570.572.330,00	Sesuai	1
Perhubungan	20.828.116.709,00	Perhubungan	20.219.297.709,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.663.856.854,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.669.038.304,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.146.906.855,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.532.906.405,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Pelayaran	17.353.000,00	Program Pengelolaan Pelayaran	17.353.000,00	Sesuai	1
Komunikasi dan Informatika	13.627.007.023,00	Komunikasi dan Informatika	13.560.726.991,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.906.510.003,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.968.309.179,00	Tidak Sesuai	0

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.379.626.850,00	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.249.531.850,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.340.870.170,00	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.342.885.962,00	Tidak Sesuai	0
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.200.153.281,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.193.106.281,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.443.990.593,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.443.856.168,00	Tidak Sesuai	0
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	154.083.000,00	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	154.083.000,00	Sesuai	1
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	312.214.400,00	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	312.214.400,00	Sesuai	1
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0,00	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0,00	Sesuai	1
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	794.022.653,00	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	794.022.653,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	485.722.910,00	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	485.722.910,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.024.725.975,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.017.813.400,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan UMKM	985.393.750,00	Program Pengembangan UMKM	985.393.750,00	Sesuai	1
Penanaman Modal	6.125.549.559,00	Penanaman Modal	6.143.658.559,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.204.810.059,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.222.919.059,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	273.293.500,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	273.293.500,00	Sesuai	1
Program Promosi Penanaman Modal	451.520.500,00	Program Promosi Penanaman Modal	451.520.500,00	Sesuai	1
Program Pelayanan Penanaman Modal	653.189.300,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	653.189.300,00	Sesuai	1

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	430.636.500,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	430.636.500,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	112.099.700,00	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	112.099.700,00	Sesuai	1
Kepemudaan dan Olah Raga	4.860.009.000,00	Kepemudaan dan Olah Raga	5.456.009.000,00		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	904.121.500,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.004.121.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.369.882.500,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.865.882.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	586.005.000,00	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	586.005.000,00	Sesuai	1
Statistik	816.052.091,00	Statistik	851.677.216,00		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	816.052.091,00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	851.677.216,00	Tidak Sesuai	0
Persandian	33.634.633,00	Persandian	33.634.540,00		
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	33.634.633,00	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	33.634.540,00	Tidak Sesuai	0
Kebudayaan	2.832.000.000,00	Kebudayaan	3.032.000.000,00		
Program Pengembangan Kebudayaan	1.084.616.000,00	Program Pengembangan Kebudayaan	1.084.616.000,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	851.800.000,00	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.001.800.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Sejarah	25.000.000,00	Program Pembinaan Sejarah	25.000.000,00	Sesuai	1
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	94.800.000,00	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	144.800.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Permuseuman	775.784.000,00	Program Pengelolaan Permuseuman	775.784.000,00	Sesuai	1
Perpustakaan	4.245.319.612,00	Perpustakaan	4.240.333.612,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.215.600.312,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.210.614.312,00	Tidak Sesuai	0

Program Pembinaan Perpustakaan	1.029.719.300,00	Program Pembinaan Perpustakaan	1.029.719.300,00	Sesuai	1
Kearsipan	565.963.900,00	Kearsipan	565.963.900,00		
Program Pengelolaan Arsip	521.771.900,00	Program Pengelolaan Arsip	521.771.900,00	Sesuai	1
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	30.080.000,00	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	30.080.000,00	Sesuai	1
Program Perizinan Penggunaan Arsip	14.112.000,00	Program Perizinan Penggunaan Arsip	14.112.000,00	Sesuai	1
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	111.769.973.248,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	112.565.352.248,00		
Kelautan dan Perikanan	1.712.565.300,00	Kelautan dan Perikanan	1.654.151.700,00		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	569.779.800,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	561.366.200,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	607.743.500,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	707.743.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	15.069.000,00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	15.069.000,00	Sesuai	1
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	519.973.000,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	369.973.000,00	Tidak Sesuai	0
Pariwisata	12.770.620.149,00	Pariwisata	12.744.589.149,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.067.620.149,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.088.789.149,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.424.325.000,00	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.427.070.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemasaran Pariwisata	600.773.000,00	Program Pemasaran Pariwisata	593.573.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	279.706.000,00	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	276.520.000,00	Tidak Sesuai	0

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.398.196.000,00	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.358.637.000,00	Tidak Sesuai	0
Pertanian	84.492.262.831,00	Pertanian	85.135.568.431,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.302.495.444,09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.318.507.444,09	Tidak Sesuai	0
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.425.715.535,91	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.456.408.735,91	Tidak Sesuai	0
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	15.986.374.801,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16.256.629.801,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.905.696.250,00	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.905.986.650,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	176.050.000,00	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	182.395.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Perizinan Usaha Pertanian	4.200.000,00	Program Perizinan Usaha Pertanian	4.200.000,00	Sesuai	1
Program Penyuluhan Pertanian	12.691.730.800,00	Program Penyuluhan Pertanian	13.011.440.800,00	Tidak Sesuai	0
Perdagangan	2.858.866.169,00	Perdagangan	3.058.866.169,00		
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	27.100.000,00	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	27.100.000,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.570.723.600,00	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.570.723.600,00	Sesuai	1
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	211.354.000,00	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	211.354.000,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Ekspor	699.271.950,00	Program Pengembangan Ekspor	849.271.950,00	Tidak Sesuai	0
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	332.116.619,00	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	332.116.619,00	Sesuai	1
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	18.300.000,00	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	68.300.000,00	Tidak Sesuai	0
Perindustrian	9.681.372.799,00	Perindustrian	9.717.890.799,00		

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.740.138.799,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.726.656.799,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	842.141.500,00	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	892.141.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	0,00	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	0,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	99.092.500,00	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	99.092.500,00	Sesuai	1
Transmigrasi	254.286.000,00	Transmigrasi	254.286.000,00		
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	254.286.000,00	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	254.286.000,00	Sesuai	1
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	115.292.721.125,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	111.468.917.125,00		
Sekretariat Daerah	50.413.964.512,00	Sekretariat Daerah	46.600.631.512,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.945.375.589,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.215.247.589,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14.306.691.080,00	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.021.691.080,00	Tidak Sesuai	0
Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.161.897.843,00	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.363.692.843,00	Tidak Sesuai	0
Sekretariat DPRD	64.878.756.613,00	Sekretariat DPRD	64.868.285.613,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.245.968.062,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.572.286.162,00	Tidak Sesuai	0
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	48.632.788.551,00	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	48.295.999.451,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	480.955.119.685,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	481.138.133.685,00		

Perencanaan	8.318.282.766,00	Perencanaan	8.850.839.766,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.887.434.136,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.276.903.046,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.090.207.750,00	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.148.295.840,00	Tidak Sesuai	0
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.340.640.880,00	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.425.640.880,00	Tidak Sesuai	0
Keuangan	457.313.270.956,00	Keuangan	456.800.089.956,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.238.792.909,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.132.814.718,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	389.789.229.872,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	389.092.969.872,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.147.323.300,00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.147.323.300,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.137.924.875,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.426.982.066,00	Tidak Sesuai	0
Kepegawaian	9.719.706.403,00	Kepegawaian	9.719.130.403,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.794.311.703,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.802.567.703,00	Tidak Sesuai	0
Program Kepegawaian Daerah	2.925.394.700,00	Program Kepegawaian Daerah	2.916.562.700,00	Tidak Sesuai	0
Pendidikan dan Pelatihan	2.411.561.560,00	Pendidikan dan Pelatihan	2.400.775.560,00		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.411.561.560,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.400.775.560,00	Tidak Sesuai	0
Penelitian dan Pengembangan	3.192.298.000,00	Penelitian dan Pengembangan	3.367.298.000,00		
Program Penelitian Pengembangan Daerah	3.192.298.000,00	Program Penelitian Pengembangan Daerah	3.367.298.000,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.007.154.754,00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.994.517.754,00		

Inspektorat	15.007.154.754,00	Inspektorat	14.994.517.754,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.559.011.254,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.546.374.254,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.873.504.500,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.873.504.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.574.639.000,00	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.574.639.000,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR KEWILAYAHAN	90.249.608.557,00	UNSUR KEWILAYAHAN	90.070.556.557,00		
Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	90.249.608.557,00	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	90.070.556.557,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.778.425.967,64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.945.729.367,64	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	258.519.400,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	257.975.400,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.958.012.789,36	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	22.662.002.789,36	Tidak Sesuai	0
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	507.723.500,00	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	484.753.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	590.716.800,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	557.826.300,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.156.210.100,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.162.269.200,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.726.933.780,00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	10.742.332.780,00		
Kesatuan Bangsa dan Politik	11.726.933.780,00	Kesatuan Bangsa dan Politik	10.742.332.780,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.306.008.218,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.357.828.218,00	Tidak Sesuai	0

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	329.592.550,00	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	270.956.550,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.372.155.500,00	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.372.155.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.285.637.512,00	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.297.772.512,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	234.327.500,00	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	234.327.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	199.212.500,00	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	209.292.500,00	Tidak Sesuai	0
TOTAL SKOR/ NILAI					73

Jumlah Sesuai : 73

Jumlah Tidak Sesuai : 95

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program
 = 73 / 168
 = 0,44

Maka perhitungan Skor Dimensi 1 IPKD adalah;

Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

= Skor Rerata x Bobot

= ((1 + 1 + 1 + 0,18 + 0,44) / 5) x 20

= (3,62 / 5) x 20

= 0,724 x 20

= 14,4800

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja Dimensi 1 sebesar: 14,48

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (14,4800 / 10,0000) \times 100\% \\
 &= \mathbf{144,8\%}
 \end{aligned}$$

2. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam IPKD, dimana indikator-indikator yang terdapat dalam dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan beberapa amanat peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain:

a. Alokasi jumlah belanja untuk urusan pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan :	817.017.473.049,16
	1 Belanja Operasi	784.896.233.091,16
	a Belanja pegawai	637.505.398.249,16
	b Belanja barang dan jasa	114.212.214.842,00
	c Belanja hibah	30.367.820.000,00
	d Belanja bantuan sosial	2.810.800.000,00
	2 Belanja Modal	32.121.239.958,00
	3 Belanja Transfer	0,00
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain :	0,00
	1 Sub Kegiatan.....pada Perangkat Daerah.....	0,00
	2 dst.....	0,00
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Jumlah (a+b)	817.017.473.049,16
3	Total Belanja Daerah	2.688.980.218.311,83
4	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	30,38%
	(Butir 2 : Butir 3) X 100%	

b. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD
 (di luar gaji)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan :	543.271.476.322,67
	1 Belanja Operasi	468.006.350.917,35
	a Belanja pegawai	94.657.881.000,00
	b Belanja barang dan jasa	373.048.469.917,35
	c Belanja hibah	300.000.000,00
	d Belanja bantuan sosial	0,00
	2 Belanja Modal	75.265.125.405,32
	3 Belanja Transfer	0,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain :	0,00
	1 Sub Kegiatan.....pada Perangkat Daerah.....	0,00
	2 dst.....	0,00
2	Alokasi Anggaran Kesehatan Jumlah (a+b)	543.271.476.322,67
3	Total Belanja Daerah	2.688.980.218.311,83
4	Gaji ASN	642.476.366.316,56
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	2.046.503.851.995,27
4	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN	26,55%
	(Butir 2 : Butir 5) X 100%	

c. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Penerimaan	
	Dana Transfer Umum	
	a DAU	1.043.910.472.000,00
	b DBH pusat	136.106.295.021,00
	c DBH provinsi	165.703.797.150,00
	Jumlah Penerimaan	1.345.720.564.171,00
2	Pengurang	
	a DAU Tambahan	0,00
	b DBH yang bersifat earmarket (cukai)	25.307.801.236,00
	c DBH yang bersifat earmarket (pajak rokok)	56.849.501.150,00
	d ADD	136.654.098.000,00
	Jumlah Pengurang	218.811.400.386,00
3	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	1.126.909.163.785,00
1	a Belanja Modal	416.039.832.909,68
	1 Tanah	3.400.000.000,00
	2 Peralatan dan mesin	87.629.960.994,82
	3 Bangunan dan gedung	52.121.221.174,50
	4 Jalan, irigasi dan jaringan	272.458.419.340,36
	5 Aset tetap lainnya	430.231.400,00
	6 Aset lainnya	0,00
	b Belanja Pemeliharaan	19.330.473.557,91
2	a Belanja Hibah	16.804.200.000,00
	b Belanja Bantuan Sosial	22.640.486.207,00
	c Belanja Bantuan Keuangan	2.250.000.000,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	477.064.992.674,59
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah Yang Penggunaannya Bersifat Umum	42,33%

d. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM)

No	SPM	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Penambahan Ruang Kelas Baru	0
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	420.704.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	804.846.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	870.714.600
		Pengadaan Mebel Sekolah	0
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0
		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	0
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.176.200.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	229.434.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	626.361.400
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	560.343.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	182.352.500
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	68.677.328.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	281.703.000
		Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	73.829.986.500
		Jumlah Pendidikan Dasar	73.829.986.500
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	170.000.000
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	103.726.500
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	634.727.200
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.766.700.000
		Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.675.153.700

Jumlah Pendidikan Kesetaraan		3.675.153.700
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	42.500.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	170.000.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	298.215.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	267.786.700
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	22.013.122.000
	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.991.623.700
	<i>Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini</i>	<i>22.991.623.700</i>
Sub Total		100.496.763.900
Total Belanja Dinas Pendidikan		887.543.466.000
Rasio Belanja SPM		11%
2 Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	250.000.000
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	250.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	200.000.000
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	200.000.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	363.400.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	363.400.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	363.400.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	757.072.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	757.072.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	757.072.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	50.000.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	50.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.000.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	50.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000

Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	125.000.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	125.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40.000.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	250.000.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	250.000.000
Sub Total	2.285.472.000
Total Belanja Dinas Kesehatan	40.898.243.911
Rasio Belanja SPM	6%

3 Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	0
	Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	0
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0
	Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	0
Sub Total		0
Total Belanja Dinas PUPR		212.127.788.001
Rasio Belanja SPM		0%

4	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	447.315.000
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	96.390.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0
		Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	543.705.000
		Jumlah Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	543.705.000
		Program Penanggulangan Bencana	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	81.214.400
		Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	81.214.400
		Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana	81.214.400
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	297.865.000
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	60.879.900
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2.055.924.750
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	83.742.100

	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	615.512.170
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	80.784.000
	Penyusunan Rencana Kontijensi	194.460.000
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	57.204.000
	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.446.371.920
	Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.446.371.920
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	107.771.000
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	51.914.500
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	433.800.000
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	68.043.260
	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	661.528.760
	Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	661.528.760
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	618.754.000
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.066.000
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	4.816.800
	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	632.636.800
	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	632.636.800
	Sub Total	5.365.456.880
	Total Belanja Satpol PP dan BPBD	19.519.019.850
	Rasio Belanja SPM	27%
5 Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
Penyediaan Permakanan	327.927.500
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	43.800.000
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	371.727.500
Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	371.727.500
Program Penanggulangan Bencana	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
Penyediaan Makanan	1.332.641.000
Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.332.641.000
Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1.332.641.000
Sub Total	1.704.368.500
Total Belanja Dinas Sosial	13.071.800.864
Rasio Belanja SPM	13%

Selanjutnya rekapitulasi Skor Dimensi pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	PRASYARAT	SKOR
Alokasi jumlah belanja untuk urusan pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD (di luar gaji)	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
TOTAL SKOR		4
SKOR RERATA		1

Maka perhitungan Skor Dimensi 2 IPKD adalah;

Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

= Skor Rerata x Bobot

= 1 x 20,0000

= 20,0000

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja Dimensi 2 sebesar:

Capaian Kinerja = (Realisasi / Target) x 100%

= (20,0000 / 15,0000) x 100%

= **133,33%**

3. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator ketepatan waktu dan keteraksesan terhadap dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diakses melalui website <https://transparansi.blitarkab.go.id/> sebagai berikut:

No	INDIKATOR	INDIKATOR							JUMLAH
		KETEPATAN WAKTU						KETERA KSESAN	
		TGL PENETAP AN	TGL UNGGAH	RW/ RENTANG WAKTU (HARI)	BAU/ BATAS AKHIR UNGGAH (HARI)	S/ TS (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	NILAI		
		1	2	3 = 2 - 1	4	5	6		
1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD			30	30	S	1	1	1
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran			30	30	S	1	1	1
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Platfon Anggaran			30	30	S	1	1	1
4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA-SKPD			30	30	S	1	1	1
5	Informasi Ringkasan Dokumen RKA-PPKD			30	30	S	1	1	1
6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perda tentang APBD			30	30	S	1	1	1
7	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD			30	30	S	1	1	1

8	Informasi Perkada tentang Penjabaran APBD			30	30	S	1	1	1
9	Informasi Ringkasan DPA SKPD			30	30	S	1	1	1
10	Informasi DPA SKPD			30	30	S	1	1	1
11	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah			30	30	S	1	1	1
12	Informasi Realisasi Belanja Daerah			30	30	S	1	1	1
13	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah			30	30	S	1	1	1
14	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD			>30	30	S	1	1	1
15	Informasi Perda tentang Perub APBD			>30	30	S	1	1	1
16	Informasi Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD			>30	30	S	1	1	1
17	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD			>30	30	S	1	1	1
18	Informasi Rencana Umum Pengadaan			30	30	S	1	1	1
19	Informasi SK Kepala Daerah tentang PPKD			30	30	S	1	1	1
20	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi			30	30	S	1	1	1
21	Informasi Laporan Arus Kas			30	30	S	1	1	1
22	Informasi LRA Seluruh SKPD			30	30	S	1	1	1
23	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD			30	30	S	1	1	1
24	Informasi Neraca			30	30	S	1	1	1
25	Informasi CaLK Pemda			30	30	S	1	1	1
26	Informasi Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah			30	30	S	1	1	1
27	Informasi LKjIP Tahunan Pemda			30	30	S	1	1	1
28	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			30	30	S	1	1	1

29	Informasi Opini BPK			30	30	S	1	1	1
TOTAL							29	29	29
RATA-RATA							1,00	1,00	1,00

Maka perhitungan Skor Dimensi 3 IPKD adalah

Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

= Skor Rerata x Bobot

= 1 x 15

= 15,0000

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja Dimensi 4 sebesar:

Capaian Kinerja = (Realisasi / Target) x 100%

= (15,0000 / 8,0000) x 100%

= **187,50%**

4. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

Penentuan skor masing-masing indicator untuk dimensi penyerapan anggaran adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau di atas 80% (lebih dari 80%) maka mendapatkan Skor 1. Sebaliknya, persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80%, maka skor diberi angka 0.

INDIKATOR PENYERAPAN	ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN ANGGARAN	SKOR
Anggaran Belanja Pegawai	966.586.997.316,56	879.899.799.906,80	91,03%	1
Anggaran Belanja Bunga	0	0	0,00%	0
Anggaran Belanja Subsidi	0	0	0,00%	0
Anggaran Belanja Hibah	77.937.124.575,00	75.575.092.850,00	96,96%	1
Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	33.311.286.207,00	31.496.375.949,00	94,55%	1
Anggaran Belanja Tidak Terduga	6.025.120.000,00	1.627.442.870,00	27,01%	0
Anggaran Barang dan Jasa	815.777.649.981,59	729.518.255.398,47	89,43%	1
Anggaran Belanja Modal	430.177.461.092,68	385.119.247.079,61	89,53%	1
TOTAL SKOR				5
RERATA SKOR				0,55

Maka perhitungan Skor Dimensi 4 IPKD adalah;

Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

= Skor Rerata x Bobot

= 0,55 x 20

= 11,0000

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja Dimensi 4 sebesar:

Capaian Kinerja = (Realisasi / Target) x 100%

= (11,0000 / 12,0000) x 100%

= **91,66%**

5. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah

Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dinilai dari indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Kemandirian Keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Fleksibilitas Keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*).
- c. Solvabilitas Operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.
- d. Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.
- e. Solvabilitas Jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.
- f. Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

Maka, data pendukung perhitungan nilai Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah digunakan data keuangan Tahun Anggaran 2021, mengingat data keuangan Tahun Anggaran 2022 dalam proses perhitungan dan belum final, dengan rincian sebagai berikut:

INDIKATOR DIMENSI 5	DATA TAHUN 2021
Total PAD	407.530.973.690,43
Total Pendapatan	2.467.651.406.772,43
Dana Alokasi Khusus (DAK)	354.043.681.507,00
Total Kewajiban	55.703.048.572,03
Belanja Pegawai	884.783.192.724,00
Total Pendapatan LO	2.284.011.841.590,18
Total Pendapatan DAK LO	354.043.681.507,00
Total Beban LO	2.001.724.167.147,15
Kas dan Setara Kas	321.514.342.900,74
Investasi Jangka Pendek	0,00
Kewajiban Lancar	55.703.048.572,03
Total Aset Tetap	4.202.538.665.442,91
Kewajiban Jangka Panjang	0,00
Jumlah Penduduk	1.223.745

Selanjutnya, dilaksanakan pengukuran dengan formulasi sebagai berikut:

Kemandirian Keuangan

$$= (\text{Total PAD} / \text{Total Pendapatan})$$

Fleksibilitas Keuangan

$$= (\text{Total Pendapatan} - \text{DAK}) / (\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})$$

Solvabilitas Operasional

$$= (\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO}) / \text{Total Beban LO}$$

Solvabilitas Jangka Pendek

$$= (\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek}) / \text{Kewajiban Lancar}$$

Solvabilitas Jangka Panjang

$$= \text{Total Aset Tetap} / \text{Kewajiban Jangka Panjang}$$

Solvabilitas Layanan

$$= \text{Total Aset Tetap} / \text{Jumlah Penduduk}$$

Setelah diketahui hasil pengukuran kondisi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Blitar (pada masing-masing indikator Dimensi 5 IPKD), maka tahap selanjutnya adalah membandingkan indikator kondisi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemerintah kabupaten/ kota lainnya, sebagaimana tabel berikut:

No.	Kabupaten Kota	LRA			LO			
		(1) Total PAD	(2) Total Pendapatan	(3) DAK Fisik & Non Fisik	(5) Belanja Pegawai	(6) Total Pendapatan LO	(7) Total DAK LO	(8) Total Beban LO
1	Kabupaten Blitar	407.530.973.690,43	2.467.651.406.772,43	354.043.681.507,00	884.783.192.724,00	2.284.011.841.590,18	354.043.681.507,00	2.001.724.167.147,15
2	Kota Blitar	297.618.527.754,02	1.041.505.261.947,02	77.436.730.761,00	314.975.285.655,00	1.124.204.463.548,12	77.436.730.761,00	1.022.460.279.838,38
3	Kota Kediri	439.896.279.120,18	1.508.822.569.098,64	107.095.067.373,00	535.870.253.053,00	1.532.177.490.953,05	107.095.067.373,00	1.443.522.123.061,78
4	Kabupaten Tulungagung	953.892.026.423,44	3.095.975.320.366,44	364.664.117.577,00	1.177.487.042.959,42	3.092.885.923.675,62	364.664.117.577,00	2.440.276.633.460,46
5	Kabupaten Trenggalek	233.490.679.200,57	1.859.926.435.396,70	285.656.087.767,00	784.241.905.822,07	1.655.165.814.306,93	286.092.401.202,00	1.781.020.532.541,73
6	Kabupaten Nganjuk	478.462.299.146,24	2.608.437.761.443,24	379.752.008.479,00	979.155.676.231,00	2.423.968.928.223,01	379.752.521.714,00	2.009.626.941.155,94
7	Kabupaten Jombang	665.844.012.375,24	2.883.526.219.043,24	357.565.521.714,00	973.014.415.798,75	2.959.148.686.593,73	357.565.521.714,00	2.676.247.755.961,09
8	Kota Malang	588.066.042.351,01	2.187.985.479.986,01	185.881.891.526,00	791.508.273.117,88	2.265.250.180.310,79	185.881.891.526,00	1.958.095.614.002,73
9	Kabupaten Malang	583.846.309.201,31	3.813.127.410.434,31	468.503.698.433,00	1.499.426.002.619,83	3.803.788.695.506,29	468.503.698.433,00	3.299.693.127.458,26
10	Kabupaten Sidoarjo	1.921.244.253.335,69	4.669.635.698.473,41	328.020.154.393,00	1.620.047.237.731,00	4.733.578.626.563,75	328.020.154.393,00	4.221.004.863.707,35
11	Kota Surabaya	5.322.810.142.550,00	8.675.008.247.134,00	384.146.950.583,00	2.353.630.642.870,00	10.259.002.814.674,80	384.146.950.583,00	9.339.697.440.353,18
12	Kota Mojokerto	256.381.213.286,13	963.876.748.546,13	68.735.008.571,00	343.371.626.983,00	908.038.106.911,33	68.735.008.571,00	898.052.550.578,05
13	Kabupaten Mojokerto	625.418.916.520,09	2.606.948.558.432,54	319.180.219.960,00	929.951.169.942,00	2.697.508.854.216,34	319.180.219.960,00	2.504.301.729.755,30
14	Kabupaten Gresik	1.031.387.734.236,41	3.133.574.194.041,41	266.314.229.044,00	944.573.454.546,04	1.119.335.721.516,60	266.314.229.044,00	2.979.217.166.206,14
15	Kabupaten Tuban	614.733.285.905,09	2.693.892.209.851,81	295.091.258.199,00	927.166.035.558,00	2.456.740.071.668,69	295.091.258.199,00	2.116.530.227.363,93
16	Kabupaten Lamongan	604.587.635.067,78	2.975.019.936.520,51	401.859.293.484,00	980.281.672.747,00	3.083.139.953.813,64	401.859.293.484,00	2.221.019.878.482,70
17	Kabupaten Ngawi	295.080.331.088,80	2.202.023.202.926,80	336.856.691.503,00	975.907.286.880,13	2.218.653.490.051,87	336.856.691.503,00	2.064.528.273.128,09
18	Kabupaten Bojonegoro	955.640.728.380,39	5.904.101.073.579,53	290.359.894.902,00	1.003.863.956.327,00	672.150.644.075,15	331.478.896.811,00	3.042.952.409.232,04
19	Kabupaten Madiun	333.154.568.459,37	1.978.493.284.512,37	327.207.029.826,00	696.782.827.224,00	1.880.497.250.250,41	327.207.029.826,00	1.937.583.120.172,97
20	Kota Madiun	265.920.295.216,86	1.100.682.829.130,86	72.994.976.394,00	413.765.191.395,00	1.120.383.530.679,47	72.994.976.394,00	1.019.248.208.747,78
21	Kabupaten Magetan	203.465.853.559,25	1.801.812.706.354,25	269.443.595.171,00	749.724.768.596,00	1.989.969.670.560,21	269.443.595.171,00	1.534.560.972.945,59
22	Kabupaten Ponorogo	303.331.015.448,27	2.251.782.234.203,27	318.666.710.776,00	892.778.401.222,50	2.245.597.525.033,60	318.666.710.776,00	2.249.455.064.599,92
23	Kabupaten Pacitan	211.689.109.365,52	1.695.124.683.282,75	288.539.572.499,00	685.105.320.296,77	1.582.257.802.884,72	288.539.572.499,00	1.567.220.192.362,96
24	Kabupaten Probolinggo	300.398.775.730,94	2.399.817.125.466,09	298.504.851.194,00	845.322.572.620,01	2.067.868.201.320,19	298.504.851.194,00	1.925.629.214.725,14
25	Kabupaten Lumajang	325.045.892.762,36	2.161.880.436.241,41	264.650.636.292,00	801.049.030.923,46	2.267.099.233.660,77	264.650.636.292,00	788.776.289.743,46
26	Kabupaten Bondowoso	223.136.567.608,59	2.054.350.628.524,73	337.831.088.097,00	799.417.410.997,00	1.842.379.337.995,35	337.831.088.097,00	1.827.621.945.024,36
27	Kabupaten Situbondo	228.766.562.733,20	1.752.515.838.351,34	260.582.368.275,00	674.615.720.105,00	1.561.733.401.616,33	273.747.147.569,00	1.506.030.874.620,15
28	Kabupaten Sampang	135.499.437.439,15	1.830.349.802.578,01	273.681.146.476,00	722.697.613.572,23	1.677.912.323.355,48	273.681.146.476,00	1.540.929.460.215,50
29	Kabupaten Pamekasan	205.969.039.947,27	1.879.358.460.454,42	283.130.820.137,00	647.036.267.778,00	1.716.154.409.014,60	283.130.820.137,00	1.638.306.887.450,76

No.	Kabupaten Kota	NERACA						
		(4) Total Kewajiban	(9) Kas dan Setara Kas	(10) Investasi Jangka Pendek	(11) Kewajiban Lancar	(12) Total Aset Tetap	(13) Kewajiban Jangka Panjang	(14) Jumlah Penduduk
1	Kabupaten Blitar	55.703.048.572,03	321.514.342.900,74	-	55.703.048.572,03	4.202.538.665.442,91	-	1.223.745
2	Kota Blitar	57.911.882.216,21	240.365.421.205,01	-	55.845.165.025,21	2.515.598.532.461,45	-	149.149
3	Kota Kediri	67.693.753.108,58	505.293.836.874,91	2.000.000.000,00	67.693.753.108,58	2.522.745.226.889,41	-	287.962
4	Kabupaten Tulungagung	34.754.159.603,69	782.288.867.149,38	-	34.754.159.603,69	3.415.133.695.678,31	-	1.096.590
5	Kabupaten Trenggalek	153.589.375.091,36	224.788.253.317,13	-	116.089.375.091,36	2.081.594.633.963,72	37.500.000.000,00	734.888
6	Kabupaten Nganjuk	71.061.741.421,03	551.192.566.166,11	-	71.027.811.421,03	3.076.155.915.788,28	33.930.000,00	542.031
7	Kabupaten Jombang	69.955.557.855,05	591.953.984.686,35	-	69.955.557.855,05	3.241.704.058.425,86	-	1.325.914
8	Kota Malang	12.096.894.513,23	742.770.327.352,94	-	12.096.894.513,23	5.004.550.872.144,19	-	844.933
9	Kabupaten Malang	60.509.357.184,13	356.365.075.787,70	-	59.324.165.171,48	6.093.873.390.432,67	735.192.012,65	2.668.296
10	Kabupaten Sidoarjo	100.362.872.767,60	840.996.530.211,75	-	100.362.872.767,60	21.808.175.246.105,40	-	2.064.168
11	Kota Surabaya	749.352.323.943,90	851.069.806.043,25	-	749.352.323.943,90	42.154.728.663.954,20	-	2.880.284
12	Kota Mojokerto	14.842.677.758,00	234.958.949.020,85	-	14.842.677.758,00	1.650.224.065.465,17	34.682.499.853,38	140.544
13	Kabupaten Mojokerto	86.119.473.478,10	509.874.121.065,92	-	86.119.473.478,10	5.452.288.983.269,55	-	1.122.165
14	Kabupaten Gresik	46.104.570.478,50	246.781.746.878,61	-	46.104.570.478,50	4.945.028.770.810,04	-	1.042.801
15	Kabupaten Tuban	48.376.291.381,34	751.374.556.917,64	-	48.376.291.381,34	6.616.259.898.854,13	-	1.198.012
16	Kabupaten Lamongan	90.029.660.069,42	155.123.570.927,44	-	90.029.660.069,42	4.541.671.776.744,17	-	1.356.027
17	Kabupaten Ngawi	9.010.947.626,71	216.065.476.497,33	-	9.010.947.626,71	3.635.274.333.513,00	-	873.346
18	Kabupaten Bojonegoro	103.808.911.485,23	2.827.697.061.799,02	-	103.808.911.485,23	9.180.384.267.943,12	-	1.341.259
19	Kabupaten Madiun	30.231.056.950,72	298.350.434.303,73	-	30.231.056.950,72	4.002.687.009.625,28	-	744.350
20	Kota Madiun	15.452.215.562,42	295.953.719.466,14	-	15.452.215.562,42	2.209.312.322.797,67	-	195.175
21	Kabupaten Magetan	9.009.043.519,03	244.958.986.527,76	-	9.009.043.519,03	1.858.947.257.418,74	-	689.369
22	Kabupaten Ponorogo	85.499.679.571,75	107.618.629.979,62	-	41.400.481.571,75	2.191.363.206.190,89	44.099.198.000,00	995.839
23	Kabupaten Pacitan	4.550.599.835,82	181.401.426.519,17	-	4.550.599.835,82	1.900.050.923.792,00	-	589.108
24	Kabupaten Probolinggo	52.514.134.223,65	335.702.259.897,19	-	52.514.134.223,65	2.573.569.338.436,09	-	1.155.894
25	Kabupaten Lumajang	164.200.153.950,96	233.175.438.402,95	-	132.207.147.536,96	2.300.488.473.239,97	31.993.006.414,00	1.127.094
26	Kabupaten Bondowoso	8.506.829.474,91	227.796.515.381,93	-	8.506.829.474,91	2.497.987.791.039,12	-	778.525
27	Kabupaten Situbondo	20.175.167.130,03	436.856.447.688,87	-	20.175.167.130,03	3.819.628.445.608,90	-	685.967
28	Kabupaten Sampang	16.568.499.632,41	222.267.715.002,11	-	6.494.256.932,41	3.573.428.988.560,69	10.074.242.700,00	969.694
29	Kabupaten Pamekasan	100.607.587.157,95	214.588.732.686,76	-	38.501.701.984,70	3.136.736.352.599,18	62.105.885.173,25	850.057

No	PEMERINTAH KAB/ KOTA	KEMANDIRIAN KEUANGAN (D 5.1)	FLEKSIBILITAS KEUANGAN (D 5.2)	SOLVABILITAS OPERASIONAL (D 5.3)	SOLVABILITAS JANGKA PENDEK (D 5.4)	SOLVABILITAS JANGKA PANJANG (D 5.5)	SOLVABILITAS LAYANAN (D 5.6)
1	Kabupaten Blitar	0,165	2,247	0,964	5,772	-	3.434.162,073
2	Kota Blitar	0,121	2,585	1,024	4,304	-	16.866.345,282
3	Kota Kediri	0,292	2,322	0,987	7,435	-	8.760.687,962
4	Kabupaten Tulungagung	0,308	2,253	1,118	22,509	-	3.114.321,392
5	Kabupaten Trenggalek	0,126	1,679	0,769	1,936	55,509	2.832.533,167
6	Kabupaten Nganjuk	0,257	1,499	1,017	7,760	90.661,831	5.675.239,822
7	Kabupaten Jombang	0,231	2,422	0,972	8,462	-	2.444.882,593
8	Kota Malang	0,269	2,491	1,062	61,402	-	5.923.015,046
9	Kabupaten Malang	0,153	2,144	1,011	6,007	8.288,819	2.283.807,115
10	Kabupaten Sidoarjo	0,411	2,524	1,044	8,380	-	10.565.116,428
11	Kota Surabaya	0,614	2,672	1,057	1,136	-	14.635.615,330
12	Kota Mojokerto	0,266	2,499	0,935	15,830	15,830	11.741.689,901
13	Kabupaten Mojokerto	0,240	2,252	0,950	5,921	-	4.858.723,078
14	Kabupaten Gresik	0,329	2,894	0,286	5,353	-	4.742.063,702
15	Kabupaten Tuban	0,228	2,459	1,021	15,532	-	5.522.699,187
16	Kabupaten Lamongan	0,203	2,404	1,207	1,723	-	3.349.248,781
17	Kabupaten Ngawi	0,134	1,894	0,911	2,915	-	4.162.467,491
18	Kabupaten Bojonegoro	0,162	5,068	0,334	182,996	-	6.844.602,174
19	Kabupaten Madiun	0,168	2,271	0,802	9,869	-	5.377.425,955
20	Kota Madiun	0,242	2,394	1,028	19,153	-	11.319.648,125
21	Kabupaten Magetan	0,113	2,020	1,121	27,190	-	2.696.592,474
22	Kabupaten Ponorogo	0,135	1,976	0,857	2,599	49,692	2.200.519,568
23	Kabupaten Pacitan	0,125	2,040	0,825	39,863	-	3.225.301,513
24	Kabupaten Probolinggo	0,125	2,340	0,919	6,393	-	2.226.475,212
25	Kabupaten Lumajang	0,150	1,966	2,539	1,764	71,906	2.283.367,082
26	Kabupaten Bondowoso	0,109	2,125	0,823	26,778	-	3.208.616,025
27	Kabupaten Situbondo	0,131	2,147	0,855	21,653	-	5.568.239,355
28	Kabupaten Sampang	0,074	2,106	0,911	34,225	354,709	3.685.109,930
29	Kabupaten Pamekasan	0,110	2,135	0,875	5,573	50,506	3.690.030,613
	Min	0,074	1,499	0,286	1,136	15,830	2.200.519,568
	Max	0,614	5,068	2,539	182,996	90.611,831	16.866.345,282,000

Indeks Ratio D 5.1 =	$\frac{(\text{Nilai aktual pada perhitungan rasio} - \text{Nilai minimal pada rasio tersebut})}{(\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal})}$		
	0,165	-	0,074
	0,614	-	0,074
	= 0,169		

Indeks Ratio D 5.2 =	$\frac{(\text{Nilai aktual pada perhitungan rasio} - \text{Nilai minimal pada rasio tersebut})}{(\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal})}$		
	2,247	-	1,499
	5,068	-	1,499
	= 0,210		

Indeks Ratio D 5.3 =	$\frac{(\text{Nilai aktual pada perhitungan rasio} - \text{Nilai minimal pada rasio tersebut})}{(\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal})}$		
	0,964	-	0,286
	2,539	-	0,286
	= 0,301		

Indeks Ratio D 5.4 =	$\frac{(\text{Nilai aktual pada perhitungan rasio} - \text{Nilai minimal pada rasio tersebut})}{(\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal})}$		
	5,772	-	1,136
	182,996	-	1,136
	= 0,025		

$$\text{Indeks Ratio D 5.5} = \frac{(\text{Nilai aktual pada perhitungan rasio} - \text{Nilai minimal pada rasio tersebut})}{(\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal})}$$

-	-	15,830	=	0,000
90.611,831	-	15,830		

$$\text{Indeks Ratio D 5.6} = \frac{(\text{Nilai aktual pada perhitungan rasio} - \text{Nilai minimal pada rasio tersebut})}{(\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal})}$$

3.434.162,073	-	2.200.519,568	=	0,000
16.866.345.282,000	-	2.200.519,568		

$$\text{Indeks Kondisi Keuangan Kab.} = \frac{D 5.1 + D 5.2 + D 5.3 + D 5.4 + D 5.5 + D 5.6}{6}$$

0,705			=	0,117	
	0,117	x	15 (<i>bobot Dimensi 5</i>)	=	1,7550

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja Dimensi 5 sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\ &= (1,7550 / 5,0000) \times 100\% \\ &= 35,10\% \end{aligned}$$

6. Perhitungan Skor/ Nilai Opini BPK

Pemberian opini atas LKPD oleh BPK RI sesuai dengan amanat perundang-undangan. Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan pada tingkat kesesuaian implementasi pengelolaan keuangan daerah pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ketaatan pada peraturan perundang-undangan, kecukupan bukti, dan system pengendalian internal pemerintah.

Berdasarkan hasil opini BPK RI atas LKPD, maka dalam pengukuran skor Dimensi Opini BPK diperoleh dengan kriteria:

- Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut, maka diberikan Skor 1;
- Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 2 tahun terakhir secara berturut-turut, maka diberikan Skor 2/3 (0,667);
- Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 1 tahun terakhir, maka diberikan Skor 1/3 (0,334);
- Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini *Disclaimer*, maka diberikan Skor 0.

Pemerintah Kabupaten Blitar dalam 3 tahun terakhir (Tahun 2020-2022) secara berturut-turut telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka mendapatkan Skor 1.

Bobot Dimensi 6 IPKD (Opini BPK) sebesar 15, sehingga formulasi perhitungan Skor adalah sebagai berikut:

Indeks Dimensi Opini BPK:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Skor} \times \text{Bobot} \\
 &= 1 \times 15 \\
 &= 15,0000
 \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja pada Dimensi 6 IPKD (Opini BPK) pada Tahun 2022 sebesar:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (15,0000 / 15,0000) \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Capaian tersebut didukung oleh program/ kegiatan/ sub kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD</i>	100%	100%
	<i>Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja</i>	91%	91,31%
	<i>Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan</i>	82%	102,22%
	<i>Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP</i>	100%	100%

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan</i>	100%	100%
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun</i>	2	2
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	2	2
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	52	52
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	<i>Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	52	52
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD</i>	2	2
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	2	2
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	<i>Jumlah Dok Regulasi serta Kebijakan Bid. Anggaran</i>	1	1
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase Tk Penyerapan Anggaran PD sesuai Rencana</i>	95%	95%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	15.052	15.100
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	15.200	15.200
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi Sinkronisasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	12	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dan Laporan Arus Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<i>Jumlah Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Lap Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan</i>	7	7

	<i>PelaksanaanPemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>		
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>Jumlah Dok Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	12	12
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	<i>Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu yg Berkait an dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan</i>	1	1
Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan</i>	100%	100%
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah	<i>Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	12	12
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	<i>Jumlah Dok Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>	77	77
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	26	26
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	7	7
Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Jumlah Dok Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD</i>	1	1

Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jml Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	1	1
Penyusunan Kebijakan dan Paduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebj dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda</i>	2	2
Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/ Kota</i>	106	106
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase Realisasi Dana BK, Bagi Hasil, dan Dana Darurat</i>	100%	100%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<i>Jml Lap Hasil Analisis Perencanaan & Penyaluran BK</i>	1	1
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	1	1
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota</i>	1	1

Analisa Capaian Kinerja:

	2018	2019	2020	2021	2022
Dimensi 1	9,9793	10,1118	5,2882	11,7418	14,4800
Dimensi 2	10,0000	20,0000	10,0000	19,1379	20,0000
Dimensi 3	9,8276	8,2759	8,0172	11,1207	15,0000
Dimensi 4	10,0000	15,0000	20,0000	15,0000	11,0000
Dimensi 5	1,1196	1,1837	1,3139	3,1481	1,7550
Dimensi 6	0,0000	5,0100	10,0050	15,0000	15,0000
TOTAL	40,9265	59,5813	54,6243	75,1485	77,2350
Std. Deviasi	21,2367	19,4159	18,2637	12,3803	
Rerata	46,5764	50,9884	55,2812	65,5288	
Predikat	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan

BPKAD Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah unsur pendukung di bidang keuangan, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Maka, dalam rangka optimalisasi kemandirian fiskal daerah, BPKAD Kabupaten Blitar menyelaraskan implementasi pengelolaan keuangan daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait dengan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, telah tercapai kesesuaian nomenklatur program di antara dokumen RPJMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2022, KUA PPAS Tahun 2022 dan APBD Tahun 2022. Namun belum terdapat kesesuaian pagu program (karena bersifat indikatif).

Terkait dengan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, telah terdapat kesesuaian alokasi penganggaran untuk urusan *mandatory* di bidang pendidikan, kesehatan, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah Kabupaten Blitar belum memenuhi kriteria belanja infrastruktur minimal sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DAU). Hal tersebut dikarenakan ruang fiskal daerah yang berkurang, karena untuk pengalokasian belanja pegawai (P3K) yang bertambah secara signifikan.

Terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah, telah terupload data perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran.

Terkait dengan penyerapan anggaran dalam APBD, telah didapatkan perbandingan sebagai berikut:

Terkait dengan kondisi keuangan daerah yang diukur dengan tingkat kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan, dapat dikatakan mengalami peningkatan.

Terkait dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Opini WTP, merupakan perwujudan dari proses perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah berjalan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Dimana Pemerintah Kabupaten Blitar terus melaksanakan *upgrading* petunjuk teknis, sistem dan prosedur sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah antara lain: peningkatan pemahaman (*logical frame work*) atas paradigma pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kemandirian fiskal daerah, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan pemahaman tersebut dapat diperkuat dengan kajian akademis yang dapat memberikan feedback untuk sumber-sumber PAD lainnya. Secara spesifik BPKAD Kabupaten Blitar telah

mengimplementasikan dalam optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui mekanisme sewa aset daerah.

Dalam konteks pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah (IPKD), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian nomenklatur program dan pagu anggaran setiap program yang tidak sama antara proses penyusunan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, maupun APBD. Hal tersebut terjadi karena masa transisi SIPD dan Kepmendagri tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Program dan Kegiatan;
2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, yang telah sesuai pengalokasian belanja untuk fungsi pendidikan, urusan kesehatan, urusan infrastruktur, dan teralokasinya anggaran untuk elemen SPM (Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perkim, Trantibum Linmas, dan Sosial);
3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terdapat kendala keterlambatan proses upload data keuangan daerah, sehingga para pemangku kepentingan tidak dapat mengakses informasi tepat waktu;
4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD, telah berjalan maksimal terutama untuk penyerapan anggaran belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa, dan belanja modal;
5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah, masih sangat rendah. Dimana kondisi keuangan daerah diukur dengan indikator kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan untuk kondisi keuangan daerah Kabupaten Blitar relatif belum maksimal; dan
6. Indeks Opini BPK, dimana Pemerintah Kabupaten Blitar telah meraih predikat WTP 3 tahun berturut-turut, sehingga perolehan maksimal.

Sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Blitar sebagai pengampu urusan penunjang di bidang keuangan, maka permasalahan/ tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan pengelolaan keuangan yang baik (sesuai dengan ketentuan dalam Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah/ IPKD) adalah:

1. Permasalahan/ tantangan dalam Dimensi 1: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, antara lain terdapat ketidaksesuaian antara Pagu RKPD dan KUA-PPAS maupun Pagu KUA-PPAS dan APBD. Hal tersebut terjadi karena Pagu dalam dokumen perencanaan kinerja maupun perencanaan anggaran bersifat pagu indikatif.
2. Permasalahan/ tantangan dalam Dimensi 2: Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, antara lain terdapat ketidaksesuaian alokasi penganggaran untuk infratraktur daerah, dimana sesuai amanat peraturan perundang- undangan minimal 25% dari Dana Transfer Umum.
3. Permasalahan/ tantangan dalam Dimensi 3: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain kurang optimalnya proses upload data perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran.
4. Permasalahan/ tantangan dalam Dimensi 5: Kondisi Keuangan Daerah, antara lain masih lemahnya kondisi keuangan daerah, jika dilihat dari aspek kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan.
5. Permasalahan/ tantangan dalam Dimensi 6: Nilai Opini BPK, antara lain:
 - a. Proses pengumpulan data pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah belum optimal. Dimana masih terdapat beberapa PD yang perlu diverifikasi dan validasi ulang, karena terdapat beberapa transaksi keuangan yang belum tercatat. Sehingga dapat mempengaruhi kecepatan dalam penyusunan dan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK RI.
 - b. Temuan dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang membutuhkan respons yang cepat dan tepat, dalam melengkapi bukti-bukti pendukung atas temuan tersebut, dimana masih terdapat beberapa perangkat daerah yang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk mencukupinya.

Upaya/ solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilaksanakan secara fundamental dan teknis.

Secara Fundamental, antara lain:

1. Optimalisasi atas pemahaman kembali/ reviu atas Core Business, Business Process BPKAD Kabupaten Blitar sebagai pengelola keuangan daerah terhadap SDM;
2. Optimalisasi atas Proses updating Mindset pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan paradigma IPKD;
3. Optimalisasi Pengembangan SDM Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah;
4. Political Will pimpinan perangkat daerah dalam proses konsolidasi internal, monitoring, evaluasi dan pengendalian internal dalam membangun efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara taktis, antara lain:

1. Terkait dengan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, maka upaya/ solusi yang dilakukan adalah mengusulkan pelaksanaan reviu atas program/ kegiatan/ subkegiatan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
2. Terkait dengan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, maka perlu adanya upaya konsistensi dalam pengalokasian anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Terkait dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya upaya konsistensi dalam proses upload dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu dalam website, serta meningkatkan kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi tersebut.
4. Terkait dengan Penyerapan Anggaran dalam APBD, maka perlu adanya optimalisasi monitoring, pengendalian, dan evaluasi tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan arus kas daerah kepada masing-masing perangkat daerah.
5. Terkait dengan Kondisi Keuangan Daerah, maka perlu adanya penelitian akademis/ studi akademis/ feasibility study untuk meningkatkan kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan.

6. Terkait dengan Nilai Opini BPK, maka perlu adanya bimbingan teknis/ sosialisasi/ lokakarya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, Selain itu perlu dioptimalkan rekonsiliasi laporan keuangan secara berkala, dan percepatan tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap LKPD Kab Blitar.

SASARAN STRATEGIS 3	: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
INDIKATOR	: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah
TARGET	: 85 %
REALISASI	: 96,96%
CAPAIAN	: 114,07%

Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah dapat dinilai dengan mengukur tingkat kesesuaian nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021.

Nilai BMD merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan aset daerah, karena tanpa data dasar yang valid, optimalisasi pengelolaan aset daerah tidak dapat tercapai.

Maka, proses pengukuran peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah dilaksanakan dengan formulasi sebagai berikut:

TAHUN 2022				
NO	ASET	NERACA KEUANGAN	NERACA BMD	+/-
1	TANAH	918.848.767.875,02	919.008.787.882,02	- 160.020.007,00
2	PERALATAN DAN MESIN	970.886.642.328,71	779.100.006.174,83	191.786.636.153,88
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.416.308.613.669,83	1.398.049.416.327,49	18.259.197.342,34
4	JALAN, JARINGAN, IRIGASI	3.572.561.235.544,32	3.572.382.491.744,32	178.743.800,00
5	ASET TETAP LAINNYA	51.706.679.421,71	51.196.514.304,31	510.165.117,40
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	2.587.145.550,00	2.315.995.550,00	271.150.000,00
TOTAL		6.932.899.084.389,59	6.722.053.211.982,97	210.845.872.406,62

Sumber: Neraca dalam LKPD Kab. Blitar TA 2022 (unaudited)

$$\begin{aligned}\text{Kualitas Pengelolaan Aset Daerah} &= (\text{Nilai BMD} / \text{Nilai Aset pd Neraca}) \times 100\% \\ &= (6.722.053.211.982,97 / 6.932.899.084.389,59) \times 100\% \\ &= 96,96\%\end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebesar:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\ &= (96,96\% / 85\%) \times 100\% \\ &= \mathbf{114,07\%}\end{aligned}$$

Analisa Capaian Kinerja:

Faktor yang mendukung realisasi dan capaian tersebut adalah sinergitas antar bidang maupun antar perangkat daerah untuk menyelesaikan masalah pencatatan aset daerah. Kendala yang dihadapi adalah ruang lingkup pengelolaan aset yang relatif luas dan jumlah perangkat daerah tidak diimbangi dengan jumlah SDM pengelola BMD dan sistem yang kurang memadai.

Solusi yang dilaksanakan adalah (1) menambah kuantitas SDM aparatur pengelola BMD/ pengurus barang/ penyimpan barang (2) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM (3) membangun sistem pencatatan yang lebih handal (4) menyiapkan perangkat hukum guna memperkuat pengelolaan BMD secara yuridis, dan (5) menyiapkan aplikasi/ perangkat lunak guna meningkatkan efektivitas pencatatan dan efisiensi pengelolaan BMD. Capaian Indikator tersebut didukung oleh program/ kegiatan/ sub kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar</i>	90%	100%
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase PD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai Peraturan UU</i>	90%	94,23%
Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	2	2
Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Lap Penatausahaan BMD</i>	1	1
Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Lap Hasil Pengamanan BMD</i>	3	3
Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD</i>	2	1
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jml Dok Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD</i>	4	4

SASARAN STRATEGIS 4	: Terselenggaranya Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara Efektif dan Efisien
INDIKATOR	: Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
TARGET	: 75 %
REALISASI	: 100 %
CAPAIAN	: 133,33%

Sasaran Strategis 4 mengukur kualitas penunjang urusan pemerintah daerah meliputi Kegiatan: (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, (2) Administrasi Keuangan, (3) Administrasi Kepegawaian, (4) Pengadaan BMD, (5) Penyediaan Jasa Penunjang, (6) Pemeliharaan BMD, (7) Administrasi Umum. Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui penjumlahan capaian kinerja 7 kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemda dibagi 7, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Rata-Rata Tk. Capaian Kinerja:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Cap.Keg 1} + \text{Cap.Keg 2} + \text{Cap.Keg 3} + \text{Cap.Keg 4} + \text{Cap.Keg 5} + \text{Cap.Keg 6} + \text{Cap.Keg 7}}{7} \\
 & \frac{100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%}{7} \\
 & = \frac{700\%}{7} \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4 BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebesar:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (100 / 75) \times 100\% \\
 &= \mathbf{133,33\%}
 \end{aligned}$$

SASARAN STRATEGIS 5	: Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel
INDIKATOR	: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP
TARGET	: 100% 91% 82% 100%
REALISASI	: 100% 91,31% 102,22% 100%
CAPAIAN	: 100% 100,34% 124,65% 100%

Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran diukur dengan perhitungan kesesuaian program yang ditetapkan dalam dokumen RKPD dengan program yang ditetapkan dalam dokumen DPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Program yang Sesuai dalam DPA}}{\text{Total Program RKPD}} \times 100\%$$

$$\frac{168}{168} \times 100\%$$

= 100%

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\ &= (100 / 100) \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja diukur dengan perhitungan Realisasi Belanja dibandingkan dengan Anggaran Belanja, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 2.468.613.988.476,88}}{\text{Rp. 2.703.474.359.544,83}} \times 100\%$$

$$= 91,31 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\ &= (91,31 / 91) \times 100\% \\ &= \mathbf{100,34\%} \end{aligned}$$

Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan diukur dengan perhitungan Realisasi Pendapatan dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 2.445.113.221.433,68}}{\text{Rp. 2.391.960.016.644,09}} \times 100\%$$

$$= 102,22 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\ &= (102,22 / 82) \times 100\% \\ &= \mathbf{124,65\%} \end{aligned}$$

Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP diukur dengan perhitungan Realisasi SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP dibandingkan dengan Jumlah SKPD, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{SKPD yang menyusun LK tepat waktu dan sesuai SAP}}{\text{Total SKPD}} \times 100\%$$

$$\frac{53}{53} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\ &= (100 / 100) \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

SASARAN STRATEGIS 6	: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
INDIKATOR	: Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar
TARGET	: 90%
REALISASI	: 100%
CAPAIAN	: 111,11%

Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam pencatatan nilai barang ke Neraca BMD tidak ada yang bernilai Rp. 0,00 atau Rp. 1,00. Indikator ini untuk mengukur tingkat efektivitas penilaian kembali atas nilai BMD yang tidak wajar, dengan harapan bahwa Nilai BMD dalam Neraca BMD secara keseluruhan bernilai wajar. Dasar perhitungan tersebut memakai dokumen KIB A, B, C, D, E, dan F dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah BMD yang Bernilai Wajar}}{\text{Total BMD}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 6.722.053.211.982,97}}{\text{Rp. 6.722.053.211.982,97}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja Sasaran Strategis 6 sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\ &= (100 / 90) \times 100\% \\ &= \mathbf{111,11\%} \end{aligned}$$

Analisa Capaian Kinerja:

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Terselenggaranya Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara Efektif dan Efisien dengan indikator Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2022 telah tercapai 100%. Hal tersebut dikarenakan sasaran strategis 4 mengampu kegiatan rutin yang harus terlaksana, sebagai dukungan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, didukung oleh capaian: (1) Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebesar 100%, (2) Tingkat Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja sebesar 100,34%, (3) Tingkat Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan sebesar 123,30%, dan (4) SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin optimal. Hal tersebut didukung oleh implementasi Perda Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Peraturan Bupati Blitar Nomor 143 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar dengan capaian sebesar 111,11%, didukung oleh komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan inventarisasi/ penilaian kembali atas BMD bernilai Rp.0/ Rp.1 sebagai Rencana Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan menjadi salah satu Renaksi KPK.

Perbandingan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perda Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Selanjutnya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah unsur penunjang bidang keuangan, dengan mempertimbangkan perkembangan isu-isu strategis terkini, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 3.1.2
 Perbandingan Realisasi Kinerja
 BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2020-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI INDIKATOR	
				2021	2022
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	78/ BB	84,62/ A	85,45/A
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10	11,7418	14,4800
		Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	15	19,1379	20,0000
		Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	8	11,1207	15,0000
		Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD	12	15,0000	11,0000
		Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	5	3,1481	1,7550
		Opini BPK	15	15,0000	15,0000
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	85%	91,92%	96,96%
	Terselenggaranya Seluruh Kegiatan pada Prog Penunjang Urusan Pemda secara Efektif dan Efisien	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	100%	133,33%
	Terselenggaranya Pengelolaan Keuda yang Akuntabel	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	91%	92,44%	91,31%
		Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	82%	105,74%	102,22 %

	Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Bernilai Baik dan Wajar	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	90%	91%	100%

Dari tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa percepatan tingkat kemajuan Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat pada Sasaran Strategis/ IKU ke-5, terkait dengan Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan sebesar 102,22%. Hal tersebut terjadi karena BPKAD Kabupaten Blitar telah menindaklanjuti hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan pengukuran Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) pada tahun sebelumnya.

Tingkat kemajuan berkategori rendah terdapat pada Sasaran Strategis/ IKU ke-2, terkait dengan Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dengan nilai sebesar 1,7550. Walaupun dari sisi pendapatan daerah mengalami kenaikan, tetapi jika dibandingkan dengan kondisi fiskal daerah, kondisi keuangan daerah perlu mendapatkan *threathment*/ perbaikan. Hal yang mendasar adalah peningkatan pendapatan daerah dan efektivitas penganggaran belanja. Maka BPKAD Kabupaten Blitar melakukan perbaikan kinerja dalam rangka memperkuat kemandirian keuangan daerah, dengan cara memperbaiki strategi portofolio/ lanskap keuangan daerah/ fiskal daerah dengan penguatan pendapatan daerah. Hal yang dilakukan adalah dengan menambah sub kegiatan koordinasi perencanaan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Hal tersebut sebagai sarana bagi BPKAD untuk melakukan koordinasi lintas fingsi/ lintas bidang dengan perangkat daerah terkait untuk menunjang peningkatan kemandirian fiskal daerah berbasis kondisi keuangan daerah yang “sehat”.

Upaya tindak lanjut tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021- 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar 2021-2026, dimana di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Visi Bupati Blitar dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Blitar adalah Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*).

BPKAD Kabupaten Blitar merupakan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang bidang keuangan, berperan serta dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 khususnya pada Misi Ke-3: Pengoptimalan Kinerja

Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas, dengan Tujuan: Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, dan Sasaran: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Blitar 2021-2026 pada BPKAD Kabupaten Blitar tidak terlepas dari faktor internal (realitas yang berkembang di dalam lembaga) maupun faktor eksternal (realitas yang berkembang di luar lembaga). Keberhasilan pelaksanaan visi dan misi di atas dapat tercapai dengan efektif dan efisien, jika lembaga tersebut mengetahui potensi yang ada, melalui metode Analisis SWOT, yang dijabarkan sebagai berikut:

ANALISIS SWOT

Kekuatan (Strenght)

1. Memiliki Tupoksi yang cukup strategis;
2. Tersedianya SDM Aparatur;
3. Koordinasi yang baik antar bidang;
4. Kinerja SDM yang cukup baik

Kelemahan (Weakness)

1. Keterbatasan Penganggaran;
2. Validasi data aset daerah yang belum optimal;
3. Belum optimalnya pendampingan PD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

Peluang (Opportunity)

1. Koordinasi yang baik antar PD dan pihak terkait
2. Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang semakin pesat;
3. Perencanaan anggaran berbasis kinerja;
4. Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang pasti

Ancaman (Treatment)

1. Kondisi kapasitas fiskal daerah yang menurun
2. Pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya
3. Perubahan kondisi perekonomian nasional/ regional yang berubah dengan cepat, berdampak pada perubahan regulasi

Berdasarkan analisa SWOT di atas, maka kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) merupakan faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sebaliknya, kelemahan (weakness) dan hambatan (threats) merupakan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka memformulasikan strategi dan kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar dalam rangka memenuhi target kinerja 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:

Pada Proses analisis SWOT, strategi dapat diformulasi dengan menginteraksikan keempat aspek tersebut. Pertama adalah strategi S-O, strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, perangkat daerah memiliki peluang dan kekuatan di saat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar- besarnya atau biasa disebut Comparative Advantage. Strategi yang harus diterapkan adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy). Strategi ini memberikan penekanan pada metode perangkat daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada.

Strategi S-O
1. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dinamis, responsif, dan transformatif 2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah; 3. Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah. 4. Peningkatan dukungan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Blitar untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada perangkat daerah didorong untuk menggeser ancaman menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki.

Strategi S-T
1. Peningkatan kualitas perencanaan dan inventarisasi aset daerah; 2. Peningkatan kualitas pencatatan dan penghapusan aset daerah; dan 3. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan penjagaan aset daerah.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. BPKAD Kabupaten Blitar menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divestment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Blitar bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing.

Strategi W-O
1. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian APBD; 2. Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban APBD;

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Strategi W-T
1. Optimalisasi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD di saat pandemi COVID-19 dan ruang fiskal pemerintah daerah yang menurun

Dalam analisis lingkungan di atas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Melalui proses Analisis SWOT yang telah dilakukan, setidaknya teridentifikasi alternatif strategi BPKAD Kabupaten Blitar pada periode Renstra Tahun 2021-2026. Seluruh alternatif strategi kemudian dimatangkan melalui FGD (*Forum Group Discussion*). Pada akhirnya BPKAD Kabupaten Blitar kemudian bersepakat menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dinamis, responsif, dan transformatif;
2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

3. Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah;
4. Peningkatan kualitas perencanaan keuangan daerah melalui optimalisasi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD di saat pandemi COVID-19 dan ruang fiskal pemerintah daerah yang menurun;
5. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian APBD;
6. Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban APBD;
7. Peningkatan dukungan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
8. Peningkatan kualitas perencanaan dan inventarisasi aset daerah;
9. Peningkatan kualitas pencatatan dan penghapusan aset daerah; dan
10. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan penjagaan aset daerah.

Arah Kebijakan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan kinerja yang memberikan arahan dan panduan kepada BPKAD Kabupaten Blitar agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar juga merupakan pedoman untuk menentukan kinerja selama lima tahun guna mencapai sasaran Renstra dan RPJMD secara bertahap. Penyusunan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi keadaan keuangan dan aset daerah maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang kondisi keuangan daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan

pelaksanaannya. Penekanan kinerja tahunan pada BPKAD Kabupaten Blitar juga memerhatikan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD. Hal tersebut memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA <i>, BALDATUN, TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR</i>				
MISI 3: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas				
Tujuan: Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas				
Sasaran: Meningkatnya Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dinamis, responsif, dan transformative	Optimalisasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional
				Optimalisasi manajemen kepegawaian
			Optimalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan Kapasitas ASN BPKAD dalam implementasi SAKIP dan RB
				Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja PD
			Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan PD	Peningkatan kualitas verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan PD
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan keuangan daerah	Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keuangan daerah
				Peningkatan kualitas kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
				Penguatan koordinasi secara berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan

				Sinkronisasi antara perencanaan pemb. daerah dan penganggaran keuangan daerah serta pengalokasian anggaran belanja
				Optimalisasi Mekanisme Penyusunan RAPBD/ RAPBD-P dan Penetapan APBD/ APBD-P
		Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian APBD		Optimalisasi Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
				Pengendalian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta dana transfer secara optimal
				Penyerapan anggaran yang tepat waktu
		Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban APBD		Optimalisasi penyusunan Laporan Realisasi APBD dan Perubahan APBD
				Optimalisasi pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan SAP
				Optimalisasi penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
				Optimalisasi penyelesaian kerugian daerah
				Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
				Transparansi dan ketepatan waktu dalam penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah
				Optimalisasi kondisi keuangan daerah
		Peningkatan dukungan pengelolaan keuangan daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel		Optimalisasi penyelenggaraan informasi keuangan daerah
				Peningkatan IT serta sarana dan prasarana yang memadahi
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan inventarisasi aset daerah	Peningkatan kapasitas SDM pengelola aset daerah
				Peningkatan kualitas kebijakan teknis pengelolaan aset daerah

				Peningkatan perencanaan dan pengendalian aset serta pemanfaatan inventarisasi aset
			Peningkatan kualitas pencatatan dan penghapusan aset daerah	Pemuktahiran dan Optimalisasi penghapusan aset
			Peningkatan kualitas pemanfaatan dan penjagaan aset daerah	Optimalisasi pemanfaatan aset dan peningkatan penjagaan aset daerah
			Optimalisasi dukungan pengelolaan aset daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Peningkatan IT serta sarana dan prasarana yang memadahi

Strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan diharapkan dapat menjadi penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan dan program prioritas antara perangkat daerah dan pemerintah daerah. Dengan maksud bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan perlu strategi yang tepat selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

3.2 Realisasi Anggaran

Salah satu harapan terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (good government) adalah terciptanya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal. BPKAD Kabupaten Blitar, menjadi unsur pendukung dari pemerintah daerah di bidang keuangan, berusaha merespons harapan tersebut, dengan terus meningkatkan kinerja kelembagaan dan kinerja keuangan daerah. Dimana kinerja keuangan daerah dapat dievaluasi melalui realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Efektivitas realisasi anggaran dapat dinilai dari tingkat ketepatan waktu penyerapan anggaran dan capaiannya pada akhir tahun, serta sisa lebih perhitungan anggaran. Perbandingan anggaran pada BPKAD Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

2021	2022	Selisih
Rp. 382.850.944.511,38	Rp. 406.043.305.781,00	23.192.361.269,62

Dari total pagu anggaran yang dikelola BPKAD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022, dialokasikan pada 3 program, 12 kegiatan, dan 49 sub kegiatan, yang mendukung capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKU). Alokasi per sasaran pembangunan/ cost per outcome merupakan instrument untuk melihat perbandingan antara anggaran per sasaran strategis dengan total anggaran. Berikut disajikan Alokasi per Sasaran Pembangunan BPKAD Kabupaten Blitar per Tahun 2022:

Tabel 3.2.1
Alokasi per Sasaran Pembangunan
BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE ANGGARAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai dan Predikat SAKIP PD	19.066.332.609,00	4,69
Terselenggaranya Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara Efektif dan Efisien	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuda	Indeks Dimensi Kesesuaian Dok Perencanaan dan Penganggaran	381.706.140.372,00	94,00
	Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD		
	Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuda		
Terselenggaranya Pengelolaan Keuda yang Akuntabel	Persentase Kesesuaian Dok Perencanaan Penganggaran		
	Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD	418.730.000,00	0,11
	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja		
	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan		
	Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	704.779.500,00	0,17
	Opini BPK		
	Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP		

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	4.147.323.300,00	1,03
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Bernilai Baik dan Wajar	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar		

Dari tabel di atas maka dapat didiskripsikan bahwa 94,28% dari total anggaran dialokasikan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaporan keuangan daerah, yang pada akhirnya mendukung capaian terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Alokasi anggaran sebesar 1,03% dari total anggaran dialokasikan untuk pengelolaan aset daerah. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar 4,69%.

Dalam rangka mengukur efisiensi kinerja dan anggaran, maka BPKAD Kabupaten Blitar melakukan pengukuran melalui perbandingan Tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai dan Predikat SAKIP PD	78/ BB	85,45/ A	109,55 %	19.066.332.609	15.020.112.791	85,14 %
Terselenggara nya Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemda secara Efektif dan Efisien	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Prog. Penunjang Urusan Pemda	75%	100%	133,33 %			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuda	Indeks Dimensi Kesesuaian Dok. Perencanaan dan Penganggaran	10,0000	14,4800	144,80 %	381.706.140.372	368.959.409.687	96,66 %

	Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	15,0000	20,0000	133,33 %			
	Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuda	8,0000	15,0000	187,50 %			
Terselenggara nya Pengelolaan Keuda yang Akuntabel	Persentase Kesesuaian Dok.Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	100%			
	Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD	12,0000	11,0000	91,66%	418.730.000	395.365.875	94,42 %
	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	91%	91,31%	100,34 %			
	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	82%	102,22 %	124,65 %			
	Indeks Dimensi Kondisi Keuda	5,0000	1,7550	35,10%	704.779.500	629.529.817	89,32 %
	Opini BPK	15,0000	15,0000	100 %			
	Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tk. Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	85%	96,96%	114,07 %	4.147.323.300	3.379.393.097	81,48 %
Terselenggara nya Pengelolaan BMD yang Bernilai Baik dan Wajar	Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	90%	100%	111,11 %			

Realisasi anggaran tertinggi sebesar 96,66% terdapat pada dukungan capaian dimensi 1,2,3 IPKD masing masing sebesar 144,80% (dimensi1), 133,33% (dimensi 2), dan 187,55% (dimensi 3) dan Capaian penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah 100%. Realisasi anggaran terendah sebesar 81,48% terdapat pada dukungan kualitas pengelolaan aset daerah dan BMD yang bernilai baik dan wajar masing-masing sebesar 114,07% dan 111,11%. Dengan capaian kinerja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas realisasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja.

Selanjutnya tingkat efisiensi penggunaan sumber daya juga dapat diukur dan dianalisa dalam tabel 3.2.3 Sebagai berikut:

Tabel 3.2.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
BPKAD Kabupaten Blitar tahun 2022

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFISIENSI %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai dan Predikat SAKIP PD	121,44%	85,14%	36,30%
Terselenggaranya Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemda secara Efektif dan Efisien	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Prog. Penunjang Urusan Pemda			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuda	Indeks Dimensi Kesesuaian Dok. Perencanaan dan Penganggaran	141,41%	96,66%	44,75%
	Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD			
	Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuda			
Terselenggaranya Pengelolaan Keuda yang Akuntabel	Persentase Kesesuaian Dok.Perencanaan dan Penganggaran			
Terselenggaranya Pengelolaan Keuda yang Akuntabel	Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD	105,55%	94,42%	11,13%
	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja			
	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan			

	Indeks Dimensi Kondisi Keuda	78,36%	89,32%	-40,96%
	Opini BPK			
	Persentase SKPD yang LK Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tk.Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	112,58%	81,48%	31,10%
Terselenggaranya Pengelolaan BMD yang Bernilai Baik dan Wajar	Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar			

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran strategis merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kelembagaan dalam meningkatkan *performance*-nya. Semakin besar tingkat efisiensinya maka *performance* suatu perangkat daerah akan semakin baik, demikian sebaliknya semakin rendah/ kecil tingkat efisiensinya, maka perangkat daerah tersebut perlu dievaluasi baik tata kerjanya maupun SDM nya. Tabel 3.2.3 di atas, mendiskripsikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang paling signifikan terjadi pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuda dan Terselenggaranya Pengelolaan Keuda yang Akuntabel sebesar 44,75%. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan, antara lain:

1. Tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang relatif konsisten dalam penetapan program antar dokumen;
2. Pengalokasian anggaran dalam APBD telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah telah berjalan optimal.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Dalam rangka mendukung Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baladatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*), BPKAD Kabupaten Blitar sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan, berusaha meningkatkan kinerjanya, dengan melaksanakan perencanaan yang terukur. Selanjutnya BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara yang berkesinambungan, hingga pada akhirnya melaksanakan pengendalian/ evaluasi kinerja secara menyeluruh. Dalam menjalankan tupoksinya, BPKAD Kabupaten Blitar berupaya untuk memberikan nilai tambah/ nilai positif, yang dapat mendukung upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Blitar 2021-2026, BPKAD Kabupaten Blitar memiliki peran serta dalam mewujudkan misi ke-3, yaitu Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas. Hal tersebut bertujuan untuk menjawab isu strategis: (1) tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, (2) tuntutan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik, dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Dengan sasaran strategis Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas, serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Blitar sebagai upaya untuk menjawab isu- isu strategis tersebut, antara lain:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Secara umum pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut mengacu pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara umum pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

Secara umum pengukuran IKU tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Terselenggaranya Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemda secara Efektif dan Efisien

Secara umum pengukuran IKU tersebut mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena di dalam program penunjang terdapat penyediaan barang/ jasa pendukung kegiatan perangkat daerah.

5. Terselenggaranya Pengelolaan Keuda yang Akuntabel

Secara umum pengukuran IKU tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi bidang penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

6. Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Bernilai Baik dan Wajar

Secara umum pengukuran IKU tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Tahun 2022 BPKAD Kabupaten Blitar terus berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan proses bisnis perencanaan penganggaran, peningkatan pelayanan verifikasi pencairan anggaran yang tepat waktu, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Di bidang keuangan, BPKAD berupaya melakukan pengelolaan keuangan daerah berbasis TI/ aplikasi SIPD dan FMIS. Di bidang pengelolaan aset daerah, BPKAD Kabupaten Blitar terus berupaya untuk memenuhi Renaksi MCP KPK dan Tindak Lanjut Temuan BPK dengan melaksanakan pencatatan aset yang akuntabel, pemanfaatan aset yang efektif, dan pengamanan aset (sertifikasi tanah dan tanah di bawah jalan kabupaten), penilaian aset daerah yang telah dilaksanakan secara bertahap. Hal ini menunjukkan sinyal positif peningkatan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagaimana didiskripsikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2022.

Dalam tata kelola keuangan perangkat daerah, BPKAD Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran daerah, realisasi pendapatan, realisasi penyerapan anggaran, dan pertanggungjawaban-pelaporan keuangan daerah secara optimal, dengan harapan dapat meningkatkan

kemandirian fiskal daerah sesuai dengan *framework* Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka perlu didukung oleh budaya kerja organisasi yang mendukung terlaksananya indikator kinerja utama perangkat daerah.

Maka BPKAD Kabupaten Blitar perlu berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi organisasi pembelajar (*learning organizational*) dengan memanfaatkan potensi yang ada, sebagai fudamen/ dasar yang kuat bagi keberhasilan kinerja BPKAD Kabupaten Blitar. LKjIP BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan diskripsi tentang capaian kinerja pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini juga sebagai perwujudan aspek transparansi dan akuntabilitas BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, untuk berperan serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Blitar.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Di masa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa tingkat kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik akan semakin meningkat. BPKAD Kabupaten Blitar berperan aktif melaksanakan tugas penunjang Pemerintah Kabupaten Blitar di bidang keuangan.

Dengan memperhatikan perihal di atas, maka rencana tindak lanjut BPKAD Kabupaten Blitar yang dapat dilaksanakan ke depan adalah:

1. Secara internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ diklat, seminar, *workshop*, *in house training*).
2. Secara kelembagaan, meningkatkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan skala prioritas pada program/ kegiatan/ sub kegiatan, dengan mengacu pada (1) Visi Misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; (2) Isu-isu strategis yang berkembang, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan (3) Implementasi Peraturan baru dan reviu implementasi perundang-undangan yang berlaku.

3. Secara eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan), BUMN (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Taspen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPKAD Prov. Jatim), dan perangkat daerah terkait di lingkup Kabupaten Blitar, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Blitar.
4. Tindak Lanjut atas Rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 Nomor: R/700/2525/409.9.4/2022 tanggal 26 Juli 2022, antara lain:
 - a. Melakukan perbaikan dokumen LKjIP 2021 sesuai dengan ketentuan;
 - b. Melakukan *upload* Dokumen Perencanaan pada website BPKAD Kabupaten Blitar dan esr.menpan.go.id
 - c. Melakukan pemberian reward and punishment atas pengukuran kinerja yang dilakukan
 - d. Memanfaatkan teknologi informasi atas pengumpulan, pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Blitar, Maret 2023

KEPALA BPKAD KAB. BLITAR

KURDIYANTO, SE., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19770422 200212 1 004

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff	31 Desember 2022 Unaudited	31 Desember 2021 Audited
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	123.608.401.410,92	105.284.742.732,03
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	18.147.102.670,00	28.471.320.093,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	2.059.386.143,45	1.941.486.895,75
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	278.890.541.175,31	270.587.152.825,65
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.5	137.950.494.922,00	121.803.764.045,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.6	1.040.346.014.621,00	1.043.910.472.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.7	69.689.208.276,00	94.877.616.792,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.1.8	324.148.965.732,00	259.166.064.715,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.9	23.340.215.000,00	38.397.307.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.10	204.807.099.000,00	194.591.362.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.11	194.386.201.718,00	204.828.568.030,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.12	8.855.263.000,00	8.886.855.500,00
15	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.13	18.851.267.765,00	1.533.431.000,00
16	Penerimaan Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.14	0,00	92.124.992.000,00
17	Jumlah Arus Masuk (3 s.d 16)		2.445.080.161.433,68	2.466.405.135.628,43
18	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
19	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	879.899.799.906,80	884.783.192.724,00
20	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	729.518.255.398,47	653.574.547.791,51
21	Pembayaran Bunga	5.5.1.2.3	0,00	0,00
22	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.4	75.575.092.850,00	48.687.847.000,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	31.496.375.949,00	26.480.498.750,00
24	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.6	1.627.442.870,00	751.296.370,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa	5.5.1.2.7	23.916.577.423,00	8.909.878.775,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa	5.5.1.2.8	341.461.197.000,00	311.054.462.550,00
27	Jumlah Arus Kas keluar (18 s.d 26)		2.083.494.741.397,27	1.934.241.723.960,51
28	Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17-27)		361.585.420.036,41	532.163.411.667,92
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
30	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
31	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.1	0,00	0,00
32	Penjualan Atas Tanah	5.5.2.1.2	0,00	0,00
33	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.3	0,00	1.177.286.000,00
34	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.4	27.960.000,00	62.810.000,00
35	Penjualan Atas Jalan Irigasi dan Jaringan	5.5.2.1.5	0,00	0,00
36	Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.6	0,00	0,00
37	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.7	5.100.000,00	5.867.000,00
38	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	5.5.2.1.8	0,00	0,00
39	Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.1.9	0,00	0,00
40	Jumlah Arus Kas Masuk (31 s.d 39)		33.060.000,00	1.245.963.000,00
41	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
42	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.1	10.000.000.000,00	0,00
43	Perolehan Tanah	5.5.2.2.2	2.842.550.262,00	0,00
44	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.3	79.573.653.264,00	100.919.754.343,30
45	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.4	46.259.098.174,06	58.324.943.758,36
46	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.2.2.5	255.877.517.379,55	200.297.027.437,45
47	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.6	566.428.000,00	389.272.900,00
48	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.7	0,00	0,00
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.8	0,00	1.450.000.000,00

NO	URAIAN	Reff	31 Desember 2022 Unaudited	31 Desember 2021 Audited
50	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.9	0,00	0,00
51	Jumlah Arus Kas Keluar (42 s.d 50)		395.119.247.079,61	361.380.998.439,11
52	Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (40-51)		(395.086.187.079,61)	(360.135.035.439,11)
53	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
54	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
55	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.5.3.1.1	0,00	15.200.000,00
56	Jumlah Arus Kas Masuk (55)		0,00	15.200.000,00
57	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
58	Pembayaran Pokok Utang	5.5.3.2.1	0,00	0,00
59	Jumlah Arus Kas Keluar (58)		0,00	0,00
60	Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (56-59)		0,00	15.200.000,00
61	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
62	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
63	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	151.450.779.698,65	152.552.774.823,00
64	Pendapatan yang Ditangguhkan	5.5.4.1.2	0,00	0,00
65	Pengembalian Belanja	5.5.4.1.3	0,00	0,00
66	Penerimaan sisa kas UP/TUP Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.4	0,00	0,00
67	Koreksi SiLPA	5.5.4.1.4	0,00	0,00
68	Jumlah Arus Kas Masuk (63 s.d 67)		151.450.779.698,65	152.552.774.823,00
69	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
70	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	151.450.779.698,65	152.822.451.749,00
71	Sisa Kas UP/TUP Bendahara Pengeluaran Yang Terlambat Disetor	5.5.4.2.2	0,00	0,00
72	Koreksi SiLPA	5.5.4.2.3	71.078,61	0,00
73	Jumlah Arus Kas Keluar (70 s.d 72)		151.450.850.777,26	152.822.451.749,00
74	Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (68-73)		(71.078,61)	(269.676.926,00)
75	Kenaikan/Penurunan Kas (27+52+60+74)		(33.500.838.121,81)	171.773.899.302,81
76	Saldo Awal Kas		321.514.342.900,74	149.740.135.453,93
77	Saldo Akhir Kas BUD, JKN, BOS dan BLUD (80+81)		288.013.504.778,93	321.514.034.756,74
78	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
79	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	308.144,00
80	Saldo Akhir Kas	5.5.5	288.013.504.778,93	321.514.342.900,74

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

BUPATI BLITAR

RINI SYARIFAH



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 Unaudited	%	REALISASI 2021 Audited
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	114.743.250.000,00	123.608.401.410,92	107,73	105.284.952.677,03
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	18.529.260.000,00	18.147.102.670,00	97,94	28.471.414.093,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.159.386.143,45	2.059.386.143,45	95,37	1.941.486.895,75
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	219.286.892.734,64	278.923.601.175,31	127,20	271.833.120.024,65
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		354.718.788.878,09	422.738.491.399,68	119,18	407.530.973.690,43
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.a	136.106.295.021,00	137.950.494.922,00	101,35	121.803.764.045,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.b	1.043.910.472.000,00	1.040.346.014.621,00	99,66	1.043.910.472.000,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.c	81.214.157.000,00	69.689.208.276,00	85,81	94.877.616.792,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.d	355.729.175.595,00	324.148.965.732,00	91,12	259.166.064.715,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)		1.616.960.099.616,00	1.572.134.683.551,00	97,23	1.519.757.917.552,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.a	23.340.215.000,00	23.340.215.000,00	100,00	38.397.307.000,00
17	Dana Desa	5.1.1.2.2.b	204.807.099.000,00	204.807.099.000,00	100,00	194.591.362.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya (16 s/d 17)		228.147.314.000,00	228.147.314.000,00	100,00	232.988.669.000,00
19	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.a	165.703.797.150,00	194.386.201.718,00	117,31	204.828.568.030,00
21	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.b	8.960.963.000,00	8.855.263.000,00	98,82	8.886.855.500,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (20 s/d 21)		174.664.760.150,00	203.241.464.718,00	116,36	213.715.423.530,00
23	Total Pendapatan Transfer (14+18+22)		2.019.772.173.766,00	2.003.523.462.269,00	99,20	1.966.462.010.082,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	17.469.054.000,00	18.851.267.765,00	107,91	1.533.431.000,00
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	92.124.992.000,00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (25 s/d 26)		17.469.054.000,00	18.851.267.765,00	107,91	93.658.423.000,00
28	JUMLAH PENDAPATAN (7+23+27)		2.391.960.016.644,09	2.445.113.221.433,68	102,22	2.467.651.406.772,43
29	BELANJA	5.1.2				
30	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	966.586.997.316,56	879.899.799.906,80	91,03	884.783.192.724,00
32	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	815.777.649.981,59	729.518.255.398,47	89,43	653.574.547.791,51
33	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	77.937.124.575,00	75.575.092.850,00	96,97	48.687.847.000,00
34	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	33.311.286.207,00	31.496.375.949,00	94,55	26.480.498.750,00
35	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 34)		1.893.613.058.080,15	1.716.489.524.104,27	90,65	1.613.526.086.265,51
36	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
37	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	3.400.000.000,00	2.842.550.262,00	83,60	-
38	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	87.728.831.651,82	79.265.283.764,00	90,35	100.919.754.343,30
39	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	52.118.797.174,50	46.259.098.174,06	88,76	58.324.943.758,36
40	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	285.403.419.340,36	255.877.517.379,55	89,65	200.297.027.437,45
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.526.412.926,00	874.797.500,00	57,31	389.272.900,00
42	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	-
43	Jumlah Belanja Modal (37 s/d 42)		430.177.461.092,68	385.119.247.079,61	89,53	359.930.998.439,11
44	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
45	Belanja Tak Terduga		6.025.120.000,00	1.627.442.870,00	27,01	751.296.370,00
46	Jumlah Belanja Tak Terduga (46)		6.025.120.000,00	1.627.442.870,00	27,01	751.296.370,00
47	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
48	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	29.947.523.372,00	23.916.577.423,00	79,86	8.909.878.775,00
49	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	343.711.197.000,00	341.461.197.000,00	99,35	311.054.462.550,00

NO	URAIAN	Reff	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 Unaudited	%	REALISASI 2021 Audited
50	Jumlah Belanja Transfer (48 s/d 49)		373.658.720.372,00	365.377.774.423,00	97,78	319.964.341.325,00
51	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (35+43+46+50)		2.703.474.359.544,83	2.468.613.988.476,88	91,31	2.294.172.722.399,62
52	SURPLUS/DEFISIT (28-51)		(311.514.342.900,74)	(23.500.767.043,20)	7,54	173.478.684.372,81
53	PEMBIAYAAN	5.1.3				
54	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
55	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.3.1.1	321.514.342.900,74	321.514.271.822,13	100,00	149.470.458.527,93
56	Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
59	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (55 s/d 58)		321.514.342.900,74	321.514.271.822,13	100,00	149.485.658.527,93
60	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
61	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00
63	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (61 s/d 62)		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	1.450.000.000,00
64	PEMBIAYAAN NETTO (59-63)	5.1.3	311.514.342.900,74	311.514.271.822,13	100,00	148.035.658.527,93
65	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (52+64)	5.1.4	0,00	288.013.504.778,93	100,00	321.514.342.900,74

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

BUPATI BLITAR

RINI SYARIFAH



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	Reff	2022 Unaudited	2021 Audited
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	321.514.342.900,74	149.470.458.527,93
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	321.514.271.822,13	149.470.458.527,93
3	Subtotal (1-2)		71.078,61	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	288.013.504.778,93	321.514.342.900,74
5	Subtotal (3+4)		288.013.575.857,54	321.514.342.900,74
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(71.078,61)	-
7	Lain-Lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.5	288.013.504.778,93	321.514.342.900,74

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

BUPATI BLITAR

RINI SYARIFAH



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	179.204.254.743,20	221.306.078.046,54
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	308.144,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	108.792.973.816,84	100.199.273.488,83
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	16.276.218,89	8.683.221,37
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	54.910.863.047,91	50.451.075.948,91
Piutang Retribusi Daerah	347.555.562,00	327.740.582,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	21.207.916.409,09	84.951.277.357,25
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	11.701.916.200,00	10.082.865.484,00
Piutang Lainnya	2.005.809.669,08	3.213.045.298,01
Penyisihan Piutang	(49.371.316.085,95)	(46.913.620.015,63)
Beban Dibayar Dimuka	37.500.000,00	37.500.000,00
Persediaan	45.384.808.066,04	44.914.143.708,78
JUMLAH ASET LANCAR	374.238.557.647,10	468.578.371.264,06
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	28.111.003.325,31	27.602.359.729,31
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	28.111.003.325,31	27.602.359.729,31
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	28.111.003.325,31	27.602.359.729,31
ASET TETAP		
Tanah	918.848.767.875,02	905.607.127.170,76
Peralatan dan Mesin	970.886.642.328,71	882.327.857.463,56
Gedung dan Bangunan	1.416.308.613.669,83	1.344.014.529.315,09
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.572.561.235.544,32	3.328.226.921.696,68
Aset Tetap Lainnya	51.706.679.421,71	50.846.247.921,63
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.587.145.550,00	28.933.704.600,00
Akumulasi Penyusutan	(2.621.678.789.584,26)	(2.337.417.722.724,81)
JUMLAH ASET TETAP	4.311.220.294.805,33	4.202.538.665.442,91
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00

URAIAN	2022	2021
JUMLAH DANA CADANGAN	10.000.000.000,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	39.439.022.041,00	39.497.272.041,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	8.511.379.645,64	8.413.879.645,64
Aset Lain-lain	61.118.033.427,58	48.245.905.585,73
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.113.529.349,94)	(1.709.115.951,09)
JUMLAH ASET LAINNYA	106.954.905.764,28	94.447.941.321,28
JUMLAH ASET	4.830.524.761.542,02	4.793.167.337.757,56
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	211.695.241,41	256.664.252,84
Utang Belanja	34.086.975.872,01	47.301.272.807,19
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.893.755.442,00	8.145.111.512,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	37.192.426.555,42	55.703.048.572,03
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	37.192.426.555,42	55.703.048.572,03
EKUITAS		
EKUITAS	4.793.332.334.986,60	4.737.464.289.185,53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.830.524.761.542,02	4.793.167.337.757,56